



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI KOTA TANGERANG SELATAN**

SKRIPSI

**Erna Budiarti
0706212112**

**Depok
Januari 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI KOTA TANGERANG SELATAN**

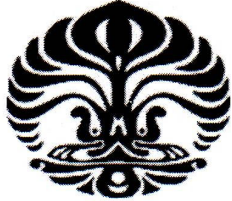
SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial dalam bidang Ilmu Administrasi Negara

**Erna Budiarti
0706212112**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA**

**DEPOK
JANUARI 2012**



Universitas Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Departemen Ilmu Administrasi
Program Sarjana Ekstensi

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

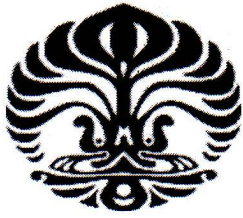
Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Erna Budiarti

NPM : 0706212112

Tanda tangan : 

Tanggal : 16 Januari 2012



Universitas Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Departemen Ilmu Administrasi
Program Sarjana Ekstensi

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Erna Budiarti
NPM : 0706212112
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Tangerang Selatan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. M. Riduansyah, M.Si (.....)

Ketua Sidang : Dra. Rainingsih Hardjo, M.A (.....)

Sekretaris Sidang : Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si (.....)

Penguji Ahli : Dra. Sri Susilih, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 16 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang selatan".

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan yang diberikan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pelajaran, fasilitas maupun doa dan motivasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
3. Drs. Asrori, MA, FLMI selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI sekaligus sebagai Sekretaris Sidang yang telah memberikan masukan bagi penulis.
5. Drs. M. Riduansyah, M.Si, selaku Pembimbing Skripsi, atas kesediaan waktu, pengarahan dan nasehatnya selama penyelesaian skripsi ini.
6. Dra. Rainingsih Hardjo, M.A selaku Ketua Sidang Skripsi peneliti yang telah memberikan saran dan masukan bagi penulis.
7. Dra. Sri Susilih, M.Si sebagai Penguji Ahli yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Segenap dosen Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
9. Kepada seluruh Staf Sekretariat Ekstensi dan Seluruh Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis dalam mencari bahan penulisan.

10. Bapak M. Nur Slamet, selaku Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan, terima kasih atas kesediaannya memberikan izin untuk penelitian.
11. Bapak Odih Supriatna, Kepala Pasar Ciputat, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk diwawancara.
12. Bapak Saiful, Kepala Pasar Jombang, terima kasih atas informasi yang diberikan dan kesediaan waktunya untuk diwawancara.
13. Kedua Orang Tua: Bapak, Ibu, dan Mbah tercinta yang sangat sabar dalam memberi nasehat, bimbingan, doa, juga memberikan dukungan moril dan materil yang sangat besar dalam kuliah sampai terselesaikannya skripsi ini.
14. Adik-adik dan saudara-saudaraku, terutama Winda dan teman spesialku cech, terima kasih selalu mendukung dan memberi semangat untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman Ekstensi Administrasi Negara angkatan 2007, terutama Mbak Susi, Runi, dan Tya yang selalu bersama-sama saling mengingatkan, membantu memberikan motivasi, serta masukan-masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Depok, 16 Januari 2012

Erna Budiarti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erna Budiarti
NPM : 0706212112
Program Studi : Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

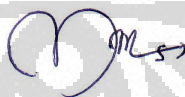
demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Tangerang Selatan

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 16 Januari 2012
Yang menyatakan



(Erna Budiarti)

ABSTRAK

Nama : Erna Budiarti
Program Studi : Administrasi Negara
Judul : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan

Dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik, pemerintah sebagai aktor pembangunan dihadapkan pada berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan atau program-program pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan pengelolaan limbah/sampah terpadu ini dibuat mengingat Kota Tangerang selatan merupakan kota mandiri pasca pemekaran daerah dari Kabupaten tangerang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi. Informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang mempunyai pengetahuan tentang kebijakan dan implementasi kebijakan. Pengelolaan sampah yang sebelumnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tangerang, tidak lagi merupakan urusan pemerintah kabupaten, tetapi menjadi urusan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, karena sudah mempunyai instansi sendiri yang menangani masalah sampah yaitu Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP). Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota baru tersebut. Dari hasil penelitian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota baru tersebut belum berjalan maksimal karena masih adanya berbagai kendala.

Kata kunci : Kebijakan Publik, Sampah, Desentralisasi

ABSTRACT

Name : Erna Budiarti
Study Program : State Administration
Title : Implementation of Waste Management Policy in South
Tangerang City

In carrying out its role as public servants, government as development actors are faced with various problems that occur in society. In an effort to answer these problems, the government issued a policy or development program to achieve those goals. Implementation of the policy in principle is the way to a policy can achieve its goals. Implementation of waste management policy/integrated waste is made considering the Tangerang City South is an independent city after the regional expansion of Tangerang Regency. This research uses qualitative research approach to the description. Information obtained by conducting in-depth interviews with sources who have knowledge of policy and policy implementation. Waste management that were previously the responsibility of the Tangerang regency government, no longer a government business distric, but the affairs of South Tangerang City government, because it already has its own agencies that deal with waste that is Department of Hygiene, Landscaping and Cemetery (DKPP). This study aims to discuss the implementation of waste management policy in the new city. From the research, implementation of waste management policy in the new town is not running maximum because there still exists a variety of conctrains.

Key words: Public Policy, Garbage, Decentraliazation

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Signifikansi Penelitian	12
1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	14
2.1. Tinjauan Pustaka	14
2.2. Kerangka Pemikiran.....	18
2.2.1. Kebijakan Publik.....	18
2.2.2. Implementasi Kebijakan Publik.....	26
2.2.3. Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah)	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1. Pendekatan Penelitian	39
3.2. Jenis Penelitian	40
3.2.1. Berdasarkan Tujuan Penelitian	40
3.2.2. Berdasarkan Manfaat Penelitian	40
3.2.3. Berdasarkan Dimensi Waktu	40
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.4. Metode dan Strategi Penelitian	42
3.5. Informan Penelitian.....	42
3.6. Lokasi Penelitian.....	43
3.7. Pembatasan penelitian.....	43
3.8. Keterbatasan Penelitian.....	43
BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN	44
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
4.1.1. Sejarah Pembentukan Kota Tangerang Selatan	44
4.1.2. Pembagian Wilayah Administratif	45

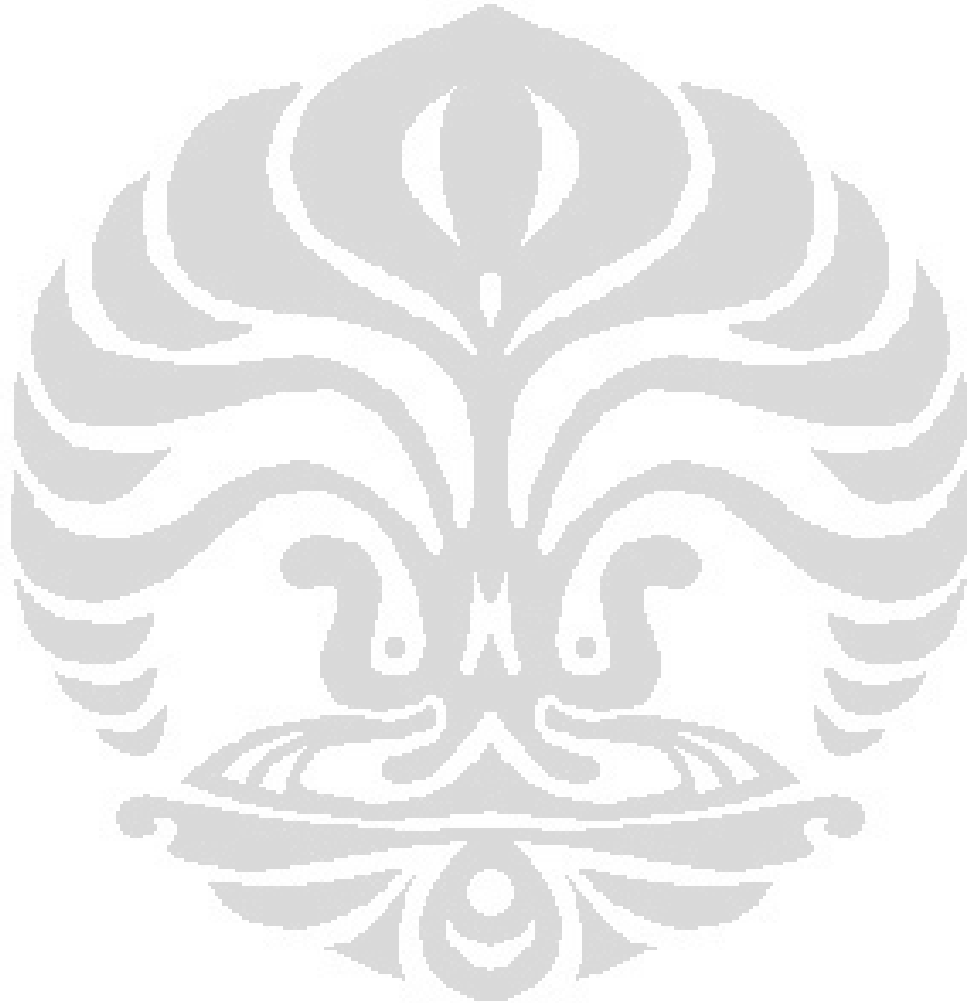
4.1.3. Kondisi Geografis dan Iklim	48
4.1.4. Pengelolaan Sampah	52
BAB V ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TANGERANG SELATAN.....	58
5.1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Tangerang Selatan.....	58
5.1.1. Faktor Internal	58
5.1.2. Faktor Eksternal.....	67
5.2. Kendala/Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan	75
5.3. Solusi Penanganan Masalah Pengelolaan Sampah Di Kota Tangerang Selatan	77
BAB VI PENUTUP	80
6.1. Simpulan	80
6.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Sebaran Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Water Treatment Plant (WTP) di Kota Tangerang Selatan.....	7
Tabel 2.1 Matriks Persandingan Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	13
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan	45
Tabel 4.2 Luas Wilayah Kelurahan/Desa Kota Tangerang Selatan	46
Tabel 4.3 Jumlah Kelurahan dan Desa per Kecamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2009	48
Tabel 4.4 Populasi Penduduk di Kota-kota Besar Indonesia.....	48
Tabel 4.5 Potensi Fisik Dasar Kota Tangerang Selatan	50
Tabel 4.6 Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan di Stasiun Geofisika Klas I Tangerang	51
Tabel 4.7 Lokasi Rawan Banjir di Kota Tangerang Selatan	51

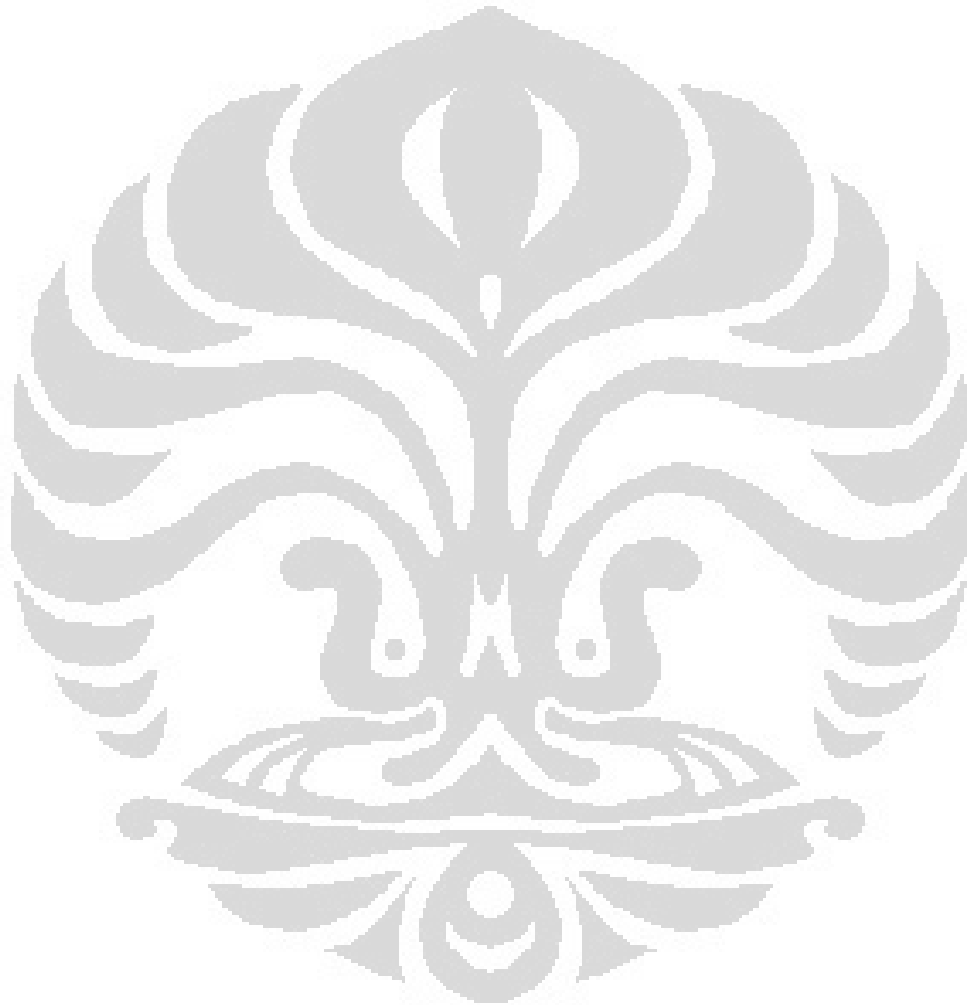
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 The Policy Cycle	24
Gambar 2.2 Tahap-tahap Kebijakan	25
Gambar 2.3 Sekuensi Implementasi Kebijakan	27



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Dokumentasi Studi Lapangan Penulis
Lampiran 2 : Hasil wawancara penulis dengan narasumber
Lampiran 2 : Rancangan Perda tentang Sampah Kota Tangerang Selatan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran kawasan perkotaan dalam pembangunan nasional dan daerah sangatlah penting. Kawasan perkotaan umumnya merupakan tempat berkembangnya kegiatan industri manufaktur dan jasa yang menawarkan peluang bagi peningkatan nilai tambah perekonomian secara keseluruhan. Perbandingan antar negara menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan suatu negara senantiasa diiringi arus transformasi, salah satunya ditandai dengan meningkatnya penduduk perkotaan.

Perkembangan kawasan perkotaan cenderung mengalami permasalahan yang hampir sama yaitu pesatnya jumlah penduduk. Antara tahun 1950 hingga tahun 1985, jumlah penduduk perkotaan di seluruh dunia meningkat menjadi hampir tiga kali lipat, yaitu bertambah sebanyak 1,25 milyar orang (Brundtland, 1987:235). Peningkatan jumlah penduduk ini masih terjadi hingga kini, terutama di negara-negara berkembang atau miskin (*The World Bank*, 2000:25). Pada awal abad 21, penduduk perkotaan di negara-negara berkembang mencapai 40% dari seluruh penduduknya. Pada tahun 2020 UNCHS memperkirakan angka ini akan mencapai 52%. Pada tahun 2015, 153 dari 358 kota berpenduduk lebih dari 1 juta, akan berada di Asia. Dari 27 *megacities* dengan penduduk melebihi 10 juta jiwa, 15 buah di antaranya akan berada di Asia. Tak dapat dipungkiri bahwa abad ini adalah abad urban. Indonesia juga akan mengalami hal yang sama (Firman dan Soegijoko, 2005:91).

Pada tahun 2004 persentase penduduk perkotaan di Indonesia mencapai 48,3%, kondisinya terus meningkat seperti keadaan tahun 1971 yang hanya sebesar 17,4% menjadi sebesar 22,27% pada tahun 1980, dan pada tahun 1995 sebesar 35,9%. Diperkirakan sebelum 2010, secara nasional jumlah penduduk perkotaan telah melampaui jumlah penduduk pedesaan, dan pada tahun 2025 proporsi penduduk perkotaan akan mencapai 68,3% (Soegijoko, 2005:iii).

Universitas Indonesia

Jumlah penduduk Indonesia telah meningkat hampir dua kali lipat selama 25 tahun terakhir, yaitu dalam dekade 1961-1971 meningkat dari 97 juta jiwa menjadi 119,20 juta jiwa atau naik rata-rata 2,1% per tahun. Selanjutnya dari 119,20 juta jiwa pada tahun 1971 bertambah menjadi 198,20 juta jiwa pada tahun 1996 dan bertambah kembali menjadi 204,78 juta jiwa pada tahun 1999. Proporsi penduduk perkotaan naik menjadi 76 juta jiwa dari 33 juta jiwa pada tahun 1980 atau 36% dari total penduduk Indonesia. Jika tingkat pertumbuhan penduduk ini tidak mengalami perubahan positif yang drastis maka pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 264,4 juta jiwa dengan asumsi tingkat pertumbuhan penduduk alami sekitar 0,9% per tahun (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, 2001:11-13). Secara keseluruhan, penambahan penduduk ini mempunyai implikasi dan dinamika yang berbeda.

Pertambahan penduduk ini diperkirakan tidak akan tersebar merata, tetapi akan terkonsentrasi di daerah perkotaan. Hal ini dikarenakan kawasan perkotaan merupakan tempat yang sangat menarik bagi masyarakat untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonomi. Selain itu, pembangunan ekonomi Indonesia melalui jalur industrialisasi berpengaruh langsung terhadap pembangunan perkotaan. Akibat perkembangan kota, muncul masalah-masalah lingkungan, khususnya pencemaran air, tanah dan udara, kemacetan lalu lintas dan lainnya, serta masalah sosial, seperti kemiskinan, permukiman kumuh, kriminalitas, konflik antar warga, dan lainnya (Soegijoko dan Firman, 2005:88).

Proses modernisasi yang dijiwai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah berhasil menciptakan kemudahan-kemudahan hidup manusia secara fisik, akan tetapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Peningkatan jumlah penduduk dunia yang diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk kota telah membuat beban lingkungan perkotaan bertambah berat (Gondokusumo, 2005:403). Kerusakan lingkungan, yang merupakan faktor ekologis sebuah kota, dapat dilihat dari kondisi air, tanah dan udara yang telah tercemar. Pencemaran itu disebabkan oleh berbagai sumber di dalam dan luar kota, serta sebagai akibat tidak berfungsinya pengelolaan sampah dan limbah kota sebagai dampak dari aktivitas perkotaan.

Pertambahan penduduk yang disertai dengan tingginya arus urbanisasi ke perkotaan sebagai dampak dari modernisasi, telah menyebabkan semakin tingginya volume sampah yang harus dikelola setiap hari. Sampah adalah suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia (Notoadmodjo, 2003). Sampah dapat berasal dari kegiatan industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan, dan kegiatan manusia lainnya (Manik, 2003:67). Pada dasarnya sampah merupakan dampak sampingan yang muncul dari berbagai upaya manusia yang dilakukan dalam rangka mencapai kesejahteraan hidupnya (Suisyanto, 2007:168).

Pertambahan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat telah menyebabkan produksi sampah pada perkotaan semakin tinggi. Hal ini bukan saja diakibatkan karena pertumbuhan penduduk tetapi juga karena meningkatnya timbunan sampah per kapita yang disebabkan oleh perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan. Jika sampah tersebut tidak ditangani dengan baik, akan dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan seperti gangguan kesehatan, misalnya tumpukan sampah di TPS merupakan sumber-sumber berkembang-biaknya vektor-vektor penyakit, seperti kecoa, lalat, nyamuk, tikus dan sebagainya. Selain itu, penanganan sampah yang tidak baik dapat menyebabkan timbunan sampah menjadi sumber kebakaran dan bahaya kesehatan yang serius bagi anak-anak yang bermain di dekatnya. Sampah juga dapat menutup saluran air sehingga meningkatkan masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan banjir dan tanah-tanah yang tergenang air. Sebanyak 20% sampah yang dihasilkan dibuang ke sungai atau sembarangan menyumbang sekitar 60%-70% pencemaran sungai (*World Health Organization*, 2001:299).

Pencemaran paling utama di Indonesia adalah pencemaran oleh limbah domestik. Oleh karena luasnya daerah pencemaran dan besarnya jumlah korban, sehingga harus diberi prioritas utama. Tetapi umumnya, masyarakat dan pemerintah lebih memberi perhatian pada limbah industri. Hal tersebut disebabkan orang sudah terbiasa dengan pencemaran domestik, selain juga karena penanggulangan limbah industri memberi citra modern (Soemarwoto, 2001:268).

Untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan lingkungan akibat sampah, maka perlu adanya pengelolaan sampah yang terprogram dengan baik. Pengelolaan sampah merupakan suatu pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbunan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku massa (*Japan Interantional Cooperation Agency, 2003:40*). Penanganan sampah merupakan upaya mencegah timbulnya pencemaran, misalnya dengan cara penimbunan sampah (*dumping*), pengisian tanah dengan sampah secara sehat (*sanitary landfill*), dan pencacahan sampah (*grinding*) (Sastrawijaya, 2000:74).

Faktor yang sangat penting dalam permasalahan lingkungan ialah besarnya populasi manusia. Pertumbuhan populasi ini telah mengakibatkan perubahan yang besar dalam lingkungan hidup. Pada dasarnya sampah memiliki hubungan yang 'abadi' dengan manusia, karena sampah merupakan zat sisa dari pemenuhan kebutuhan manusia baik itu berupa organik, non organik, maupun pabrik. Dengan pertumbuhan populasi manusia yang cepat, kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat pemukiman dan kebutuhan lain serta limbah domestik juga bertambah dengan cepat (Soemarwoto, 2001:9)

Jakarta, yang pada tahun 2010 diharapkan akan dapat menampung 12,5 juta jiwa, belum memiliki kebijakan pengelolaan limbah terpadu, menyeluruh. Kebijakan RTRW DKI Jakarta tidak memberi arahan-arahan tentang pengelolaan limbah kota yang terpadu, baik limbah padat atau sampah maupun limbah cair. Akibatnya pencemaran air sungai dan air tanah oleh sampah dan limbah cair, baik limbah domestik maupun industri, tak dapat dihindarkan. Saluran-saluran air yang dibangun secara permanen tidak dapat mengatasi genangan air atau banjir di setiap musim hujan, karena tidak adanya sistem jaringan saluran limbah kota yang terpadu. Tumpukan sampah yang tidak terangkut oleh Dinas Kebersihan tidak hanya mencemari air sungai, tetapi juga mencemari tanah dan udara (Gondokusumo, 2005:415).

Demikian juga yang terjadi dengan Kota Tangerang Selatan yang memiliki populasi 1.241.441 dengan kepadatan penduduk 6.242 jiwa/km² yang belum memiliki kebijakan pengelolaan limbah terpadu. Bencana banjir merupakan masalah yang harus dihadapi oleh penduduk yang bahkan di lokasi tertentu harus dihadapi secara rutin. Lokasi rawan banjir terdapat di sepanjang beberapa sungai yang mengalir di Kota Tangerang Selatan, di antaranya Kali Angke, Kali Serua, Kali Pasanggrahan, Kali Ciputat dan Kali Kedaung. Hal tersebut tidak terlepas dari pengelolaan limbah yang belum terorganisasi dengan baik.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain pelayanan publik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memperkecil masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dapat dikatakan kurang efektif. Pengelolaan sampah yang dilakukan masih berorientasi pada penyelesaian pembuangan sampah. Hal ini dikarenakan belum adanya perencanaan sistem pengelolaan sampah yang professional. Permasalahan sampah masih belum mendapatkan perhatian dalam hal kebijakan dibandingkan dengan permasalahan lain dalam perkembangan dan pembangunan kota. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum memahami pengelolaan sampah yang baik, padahal peran serta masyarakat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan sampah (Prihandarini, 2004).

Selama ini, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam mengelola sampahnya adalah dengan menggunakan pendekatan *end of pipe solution* (Araroi, 2004). Pendekatan ini menitikberatkan pada pengelolaan sampah ketika sampah tersebut telah dihasilkan, yaitu berupa kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan. Sampah dikumpulkan disumbernya, kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa adanya pengolahan terhadap sampah.

Pembuangan dengan cara timbunan terbuka di TPA (*open dumping*) adalah bentuk pengolahan umum yang ditemui di Indonesia (Ismawati, 2005:142). Apabila pengelolaan sampah masih dilakukan dengan cara ini, maka dapat diperkirakan kota-kota di Indonesia akan mengalami permasalahan sampah yang akan berdampak buruk bagi kehidupan. Untuk mencapai masyarakat perkotaan yang sejahtera, kualitas lingkungan hidupnya harus baik, karena akan berpengaruh pada kualitas hidupnya (*quality of life*).

Untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat (menaikkan mutu hidup rakyat), pemerintah menjalankan program-program pembangunan. Dilihat sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar pembangunan, pembangunan dipandang sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik. Pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup (Soemarwoto, 2001:158) sehingga untuk mencapai tujuan pembangunan perlu didukung oleh kualitas lingkungan hidup yang seimbang. Hal tersebut yang mendasari pemerintah kota Tangerang Selatan sebagai wilayah yang mandiri untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Kota Tangerang Selatan adalah Wilayah Otonom di Provinsi Banten. Kota ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008. Kota ini merupakan pemekaran dari kabupaten Tangerang. Rencana ini berawal dari keinginan warga di wilayah selatan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Warga merasa kurang diperhatikan Pemerintah Kabupaten Tangerang sehingga banyak fasilitas terabaikan. Beberapa tokoh dari kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tangerang mewacanakan Cipasera sebagai wilayah otonom. Pada Tanggal 27 Desember 2006, DPR Kabupaten Tangerang menyetujui terbentuknya Kota Tangerang Selatan. Jumlah penduduk di wilayah ini lebih dari satu juta jiwa. Pamulang dihuni 236.000 jiwa, sedang Ciputat dihuni 260.187 jiwa. Dari dua kecamatan ini, jumlah penduduk sudah mencapai kurang lebih 500.000 jiwa. Jika ditambah dengan penduduk Serpong, Pondok Aren, dan Cisauk akan berjumlah lebih dari satu juta jiwa. Berdasarkan fakta tersebut, Cipasera telah memenuhi syarat untuk menjadi suatu daerah otonom.

Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten dan secara administratif terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, 49 (empat puluh sembilan)

kelurahan dan 5 (lima) desa dengan luas wilayah 147,19 Km². Menurut Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2007/2008, luas wilayah kecamatan-kecamatan yang berada di Kota Tangerang Selatan (yang kemudian diambil sebagai luas wilayah kota Tangerang Selatan) adalah sebesar 150,78 Km² sedangkan menurut Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan adalah sebesar 147,19 Km² dengan rincian luas kecamatan masing-masing yang berbeda. Angka yang digunakan adalah 147,19 Km² karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten.

Dalam UU No.22/1999 dalam hal pembagian wewenang antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, meletakkan azas *residual power* pada Daerah Kabupaten dan Kota. Pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki semua kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Dengan demikian, semua kewenangan pada dasarnya sudah ada pada pemerintah kabupaten dan kota, sehingga tidak perlu dilakukan penyerahan secara aktif oleh pemerintah pusat (Prasojo, Ridwan dan Kurniawan, 2006).

Kota Tangerang Selatan merupakan wilayah yang mandiri dan berwenang mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Terkait dengan pengelolaan limbah baik limbah padat (sampah) maupun limbah cair, terdapat 21 tempat pembuangan sementara (TPS) yang sebagian besarnya menurut Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah TPS liar. Selain itu juga terdapat 5 unit water treatment plant (WTP) yang tersebar di Serpong, Serpong Utara dan Pondok Aren.

Tabel 1.1 Sebaran Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan *Water Treatment Plant* (WTP) di Kota Tangerang Selatan

No	No	Sebaran	
		TPS	WTP
1	Serpong	1	3
2	Serpong Utara	3	1
3	Ciputat	3	0
4	Ciputat Timur	1	0
5	Pamulang	3	0
6	Pondok Aren	3	1
7	Setu	7	0
Kota Tangerang Selatan		21	5

Sumber : RT/RW Kota Tangerang Selatan Tahun 2008

Universitas Indonesia

Masalah sampah di Tangerang Selatan sendiri sudah terjadi sejak awal 2009, ketika Kabupaten Tangerang selaku pemerintahan induk, menghentikan kerjasama dalam hal pengelolaan sampah, dengan ditariknyanya 39 armada pengangkut sampah dan melarang Tangerang Selatan membuang sampah di TPA Jatiwaringin, Mauk milik Kabupaten Tangerang. Hal tersebut mengakibatkan tumpukan sampah yang menggunung di sejumlah titik, seperti Pasar Ciputat yang menghasilkan sampah sekitar 70 meter kubik per hari, sampah modern BSD City sebanyak 30 meter kubik per hari, Pasar Cimanggis sekitar 40 meter kubik per hari, Pasar Jombang sekitar 30 meter kubik per hari, dan Pasar Bintaro Lama dan Baru sebanyak 30 meter kubik per hari. Dari volume itu, sebanyak 20 persen terangkut. Sisanya 60 persen dikelola masyarakat dengan dibuang di sungai, lahan kosong, median jalan, dan amrol di pasar tradisional. Sementara 20 persen lainnya dikelola sendiri pengembang besar seperti PT Bintaro Jaya, Alam Sutra, BSD, serta rumah sakit. Sampah yang menumpuk berhari-hari itu menimbulkan bau yang tidak sedap dan merusak estetika kota.

Untuk mengatasi permasalahan sampah akibat peningkatan volume sampah, akan dibangun TPST Cipeucang yang memiliki luas 2,5 hektar dan berlokasi di kecamatan Setu. Anggaran yang disediakan sekitar 5 miliar yang sepenuhnya dibiayai oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, di buat produk hukum berupa peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan sampah di pemerintah Kota Tangerang Selatan yang masih dalam proses pembuatan dengan mengacu pada peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini Perda No 12 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan milik Kabupaten Tangerang

Permasalahan sampah akan selalu terjadi apabila pengelolaan sampah yang dilakukan hanya membuang pada suatu lahan TPA. Jumlah timbunan sampah yang semakin meningkat setiap tahunnya, tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan TPA karena keterbatasan lahan dan sulitnya mencari lahan TPA baru. Akibatnya TPA yang ada akan menjadi gunung sampah yang juga akan menimbulkan banyak permasalahan baru, mulai dari permasalahan lingkungan hingga timbulnya korban jiwa seperti yang terjadi di Jakarta (kasus TPA Bantar Gebang), Bandung (TPA Leuwigajah) dan yang terjadi baru-baru ini

di TPA Galuga (Kabupaten Bogor). Permasalahan TPA inilah yang juga mulai dihadapi oleh Kota Tangerang Selatan pasca pemekaran dari Kabupaten Tangerang.

Dengan adanya ketetapan untuk melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah secara lebih mantap maka kesiapan daerah untuk mengelola pembangunan kota perlu menjadi perhatian utama. Kapasitas daerah perlu dipersiapkan, meliputi: kapasitas SDM, kapasitas struktur kelembagaannya, peraturan perundangan pendukung serta kemampuan pengelolaan pembiayaannya (Napitupulu, 2005:10) untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

1.2 Pokok Masalah

Sebagai suatu wilayah mandiri pasca pemekaran dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan memiliki semua kewenangan pemerintahan (UU No.22/1999), termasuk dalam hal manajemen pengelolaan sampah kota. Kebijakan yang menunjukkan pengelolaan sampah menjadi kewenangan pemkot. Permasalahan pengelolaan sampah kota harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah kota. Hal tersebut disebabkan kebijakan yang dilaksanakan daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sesuai prinsip desentralisasi pemerintahan/otonomi daerah.

Desentralisasi akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakat daerah, jika otonomi daerah dipahami sebagai otonomi masyarakat daerah bukan hanya otonomi pemerintahan daerah. Otonomi daerah harus memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan menentukan sendiri arah pertumbuhan, termasuk perubahan sistem yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut. Proses yang partisipatif, dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dalam otonomi daerah menjadi prasyarat utama untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Prasojo, Ridwan dan Kurniawan, 2006:23).

Hal tersebut terlihat pada masalah pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan pasca pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Pengelolaan sampah yang sebelumnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tangerang, tidak

lagi merupakan urusan pemerintah Kabupaten Tangerang, tetapi menjadi urusan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Hal ini terlihat dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menghentikan semua layanan terkait kebersihan dan sampah di wilayah Tangerang Selatan mulai awal tahun 2010. Penghentian kegiatan ini akan mengancam terganggunya proses pembuangan sampah di wilayah baru itu. Selain menarik semua armada pengangkut sampah, Tangerang Selatan juga dilarang membuang sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Mauk, Kabupaten Tangerang. Penghentian layanan tersebut terkait dengan sudah tidak ada lagi kewajiban Pemerintah Kabupaten Tangerang selaku pemerintahan induk kota baru di bidang kebersihan, dikarenakan Tangerang Selatan sudah memiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan sendiri.

Kegiatan penghentian layanan kebersihan ini meliputi, ditariknya 39 armada pengangkut sampah beserta sopir yang selama ini beroperasi di wilayah Tangerang Selatan. Tangerang Selatan juga dilarang membuang sampah di tempat pembuangan akhir di Kabupaten Tangerang. Selama ini, sampah dari Tangerang Selatan dibuang di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin, satu-satunya tempat pembuangan akhir milik Kabupaten Tangerang yang masih dioperasikan. Selama dipimpin Kabupaten Tangerang, wilayah Tangerang Selatan yang terdiri dari tujuh kecamatan meliputi Ciputat, Ciputat Timur, Serpong, Serpong Utara, Pamulang, Pondok Aren dan Setu, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga menyumbang 50 persen sampah (500-600 kubik perhari) dari total 1300 kubik perhari.

Penghentian kegiatan layanan kebersihan dan pelarangan pembuangan sampah ke TPA Jatiwaringin oleh pemerintah Kabupaten Tangerang bukan tanpa sebab. Kabupaten Tangerang beralasan akan lebih mengintensifkan kerja dalam hal pengelolaan sampah di masyarakat agar dapat dikelola dengan baik. Pemerintah kabupaten akan lebih fokus melayani masalah sampah di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Sejauh ini, Kabupaten Tangerang mengalami kesulitan dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di wilayah itu. Luasnya wilayah, minimnya tempat pembuangan sampah sementara dan terbatasnya fasilitas dan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam mengatasi masalah tersebut.

”Dengan segala keterbatasan itulah, Pemerintah Kabupaten Tangerang beralasan 80 persen dari sekitar 6.000 meter kubik sampah yang ada di Kabupaten Tangerang tidak terkelola. Hanya 20 persennya yang terkelola, selebihnya masih dibuang di sembarang tempat atau dibakar oleh penduduk” (Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang, Tempo, 03 Maret 2010).

Berkaitan dengan kebijakan penghentian layanan sampah ini membuat khawatir masyarakat di Tangerang Selatan. Tumpukan dan serakan sampah terdapat di sepanjang jalan utama dan pasar-pasar di wilayah baru tersebut. Selama ini truk pengangkut sampah milik Kabupaten Tangerang rutin mengangkut sampah di tempat-tempat tersebut, sehingga dikhawatirkan sampah semakin menumpuk. Tumpukan sampah yang membusuk karena tidak terangkut oleh mobil pengangkut sampah dapat terlihat di Jalan Raya Serpong, seperti di depan pertokoan dan tempat pembuangan sementara. Padahal sebelumnya Jalan Raya Serpong relatif bersih dari tumpukan sampah. Kondisi tersebut juga terlihat di Pasar Ciputat, dimana tumpukan sampah menjadi pemandangan yang biasa ditemui. (Tempo, Rabu 03 Maret 2010).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu manajemen pengelolaan sampah yang terprogram, karena tanpa adanya manajemen yang memadai, sampah domestik perkotaan tersebut akan menjadi permasalahan bagi pemerintah kota karena efek langsungnya terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan dan sumber daya alam.

Pemerintah kota perlu mengembangkan kebijakan manajemen sampah yang memadai untuk mengatasi permasalahan ini (Kurniawan, 2003:4-5). Melalui kebijakan pengelolaan sampah tersebut, sampah dapat diolah dan dikelola dengan baik untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja, menghasilkan produk yang bernilai ekonomis, serta mengurangi pencemaran lingkungan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan pasca pemekaran daerah dari Kabupaten Tangerang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk :
Menjelaskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan pasca pemekaran daerah dari Kabupaten Tangerang.

1.4 Signifikansi Penelitian

Terdapat beberapa sudut pandang yang pada akhirnya menentukan signifikansi penelitian ini dilakukan yaitu :

1. Secara akademis, penelitian ini berguna untuk menerapkan teori-teori mengenai Kebijakan Publik, dan Desentralisasi/Otonomi Daerah, khususnya pemekaran daerah, dan diharapkan dapat menambah wacana/referensi dan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan pada bidang Ilmu Administrasi Negara.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan/rekomendasi bagi instansi pemerintah terkait dalam kebijakan pengelolaan sampah kota.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mendapat gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritis

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka yang merupakan tinjauan pada

Universitas Indonesia

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian, sedangkan kerangka teori yaitu sejumlah konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian disusun oleh peneliti sebagai dasar acuan kerja dalam penelitian ini. Metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, metode dan strategi penelitian, informan penelitian, lokasi penelitian, pembatasan penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB IV Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian mulai dari profil sampai permasalahan yang dihadapi oleh Kota Tangerang Selatan pasca pemekaran daerah dari Kabupaten Tangerang dalam hal pengelolaan sampah.

BAB V Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan

Bab ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki Kota Tangerang Selatan sebagai wilayah yang mandiri dan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dari implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah.

BAB VI Penutup

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang dilakukan. Simpulan merupakan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang komprehensif dan berkorelasi, maka penelitian ini mencoba mengambil beberapa penelitian awal sebagai bahan rujukan yang bahasan penelitiannya memiliki relevansi yang sama dengan penelitian ini. Diharapkan dengan rujukan tersebut dapat membentuk kerangka dasar berpikir dalam melakukan kajian. Berikut ini bahan rujukan penelitian tersebut :

Penelitian pertama adalah skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 Mengenai Pengelolaan Sampah Padat di DKI Jakarta” ditulis oleh Randy Rachmawaty mahasiswa studi Administrasi Negara Universitas Indonesia pada tahun 2006. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 Mengenai Pengelolaan Sampah Padat di DKI Jakarta. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta dilihat dari aspek organisasi dan manajemen, aspek teknik operasional, aspek keuangan, aspek hukum, dan aspek peran serta masyarakat dan swasta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif dipakai untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan mekanisme implementasi kebijakan sampah berdasarkan peraturan daerah yang ada yang dibandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan melalui buku dan laporan dinas terkait serta studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap pejabat Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Konsep yang digunakan adalah konsep kebijakan, kebijakan publik, tahap-tahap pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta belum dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, dan belum memberikan hasil optimal. Hambatan yang ditemui dalam penelitian

Universitas Indonesia

kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta adalah, Pertama, tidak ada koordinasi antar dinas mengenai jumlah sampah yang diangkut ke TPA. Kedua, belum memadainya jumlah peralatan dan petugas kebersihan yang ada. Ketiga, dana operasional yang belum mencukupi kebutuhan pembiayaan. Keempat, lemahnya penerapan penegakan hukum mengenai kebersihan.

Penelitian yang kedua adalah skripsi yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terpadu Kota Depok “ ditulis oleh Peny Wulandari mahasiswa studi Administrasi Negara Universitas Indonesia pada tahun 2009. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah terpadu Kota Depok dan mengetahui hal apa saja yang menjadi hambatan implementasi kebijakan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan, menjelaskan dan mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah terpadu di Kota Depok dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dengan melakukan wawancara terbuka terhadap pejabat di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok dan studi literatur dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, internet, serta dokumen-dokumen dari instansi yang terkait.

Hasil temuan dari penelitian ini diketahui bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah terpadu sudah mengikuti ketentuan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kota Depok 2006-2011. Namun, dalam pelaksanaannya ditemui beberapa hambatan, yaitu kegiatan pembangunan unit pengolahan sampah dan operasionalisasi unit pengolahan sampah. Pada kegiatan unit pengolahan sampah disebabkan tidak adanya SOP, keterlambatan pengesahan anggaran, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Pada kegiatan operasionalisasi unit pengolahan sampah diantaranya karena kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya pekerja unit pengolahan sampah, sarana dan prasarana yang belum mencukupi serta belum adanya pemasaran hasil pengolahan sampah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah konsep kebijakan dan implementasi kebijakan dijadikan sebagai panduan dan kerangka pemikiran

dalam melakukan analisis. Namun, fokus penelitian penelitian tersebut berbeda dengan fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Randy Rachmawaty dalam skripsinya berfokus pada implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 mengenai pengelolaan sampah padat di DKI Jakarta dan Peny Wulandari dalam skripsinya mengambil fokus kajian pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah terpadu di Kota Depok. Sedangkan penelitian ini mencoba melakukan kajian terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan analisis kewenangan yang dimiliki kota Tangerang Selatan pasca pemekaran dari Kabupaten Tangerang.

Secara ringkas, perbedaan penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Matriks Persandingan Penelitian Terdahulu

	Randy Rachmawaty (Skripsi,2006)	Peny Wulandari (Skripsi,2009)	Erna Budiarti (Skripsi,2010)
Judul Penelitian	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 Mengenai Pengelolaan Sampah Padat di DKI Jakarta	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terpadu Kota Depok	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan Pasca Pemekaran Daerah dari Kabupaten Tangerang
Tujuan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 Mengenai Pengelolaan Sampah Padat di DKI Jakarta. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah terpadu Kota Depok • Mengetahui hal apa saja yang menjadi hambatan implementasi kebijakan tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan pasca pemekaran daerah dari Kabupaten

Universitas Indonesia

	kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta dilihat dari aspek organisasi dan manajemen, aspek teknik operasional, aspek keuangan, aspek hukum, dan aspek peran serta masyarakat dan swasta		Tangerang <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan, menganalisis kendala atau hambatan yang ditemui dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan pasca pemekaran daerah dari Kabupaten Tangerang
Kerangka Teori	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Kebijakan • Kebijakan Publik • Tahap-tahap Pembuatan Kebijakan • Implementasi Kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Publik • Implementasi Kebijakan Publik • Model Implementasi Kebijakan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Publik • Implementasi Kebijakan • Desentralisasi/Otonomi Daerah
Metode Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan Kualitatif • Jenis Penelitian : Deskriptif • Teknik Pengumpulan Data <ul style="list-style-type: none"> - Wawancara - Studi kepustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan Kualitatif • Jenis Penelitian <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan : Deskriptif - Manfaat : Murni - Dimensi Waktu : <i>Cross Sectional</i> • Teknik Pengumpulan Data <ul style="list-style-type: none"> - Studi Lapangan : Observasi dan Wawancara - Studi Literatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan Kualitatif • Jenis Penelitian <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan: Deskriptif - Manfaat :Murni - Dimensi Waktu : <i>Cross sectional</i> • Teknik Pengumpulan Data <ul style="list-style-type: none"> - Studi Lapangan : Observasi/ Wawancara - Studi Literatur

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini konsep yang digunakan adalah Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah).

2.2.1 Kebijakan Publik

Dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik, pemerintah sebagai aktor pembangunan dihadapkan pada berbagai masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui kegiatan atau program-program pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Anderson (1979:4) dalam Agustino (2006:7) mengenai kebijakan publik, yaitu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok orang yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka konsep kebijakan menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud dan hal ini membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada. Frederick (1963) dalam Agustino (2006:7) mengemukakan :

“a purpose course of action of a person, group or government within a given environment providing obstacles an opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose”.

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Hal ini berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai atau praktika-praktika sosial yang ada di masyarakat (Subarsono, 2008:3). Berdasarkan pendapat ini, maka dapat dipahami bahwa kebijakan publik akan ditentang oleh masyarakat ketika diimplementasikan, jika konteks kebijakan bertentangan

Universitas Indonesia

dengan nilai dan praktika sosial di masyarakat. Oleh karena itu, suatu kebijakan dapat berhasil diimplementasikan jika mampu mengakomodasi nilai dan praktika sosial yang ada di masyarakat.

Nilai dan praktika-praktika sosial yang ada di masyarakat merupakan bagian hidup dan pedoman berperilaku yang sudah ada dan dianggap baik oleh masyarakat sehingga jika pemerintah mengeluarkan program-program kebijakan untuk mengubah perilaku masyarakat, maka kebijakan tersebut akan sulit untuk diimplementasikan. Dalam suatu kebijakan, nilai dan praktika sosial juga menjadi tolak ukur yang akan menentukan tujuan-tujuan yang harus dicapai, sarana-sarana yang akan dipergunakan dan waktu yang akan dijalankan.

Kebijakan publik memiliki lingkup yang sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan. Hal ini dipertegas dengan adanya keterkaitan antara kebijakan dan pembangunan. Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang saling terkait karena keduanya merupakan proses peningkatan kualitas hidup manusia. Pembangunan adalah konteks dimana kebijakan beroperasi. Selain itu, kebijakan menunjuk pada kerangka kerja pembangunan dan memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan ke dalam beragam program dan proyek (Suharto, 2005:1).

Beragam proyek dan program-program pembangunan diarahkan dengan suatu pedoman, yaitu kebijakan. Kebijakan berfungsi untuk memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program-program pelayanan sosial yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan (Suharto, 2005:2).

Pembangunan adalah suatu proses yang dinamis. *The World Commission on Environment and Development* (1987) merumuskan “

“konsep pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan saat sekarang dengan memperhitungkan kemampuan generasi-generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang mempertimbangkan sumber daya langka untuk generasi-generasi masa depan. Konsep pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan memakai manajemen sumberdaya dan lingkungan hidup” (Raldi Hendro Koestoer, 1997:17).

Menurut Spalding dalam Tjokroamidjojo (1981:222) :

“pembangunan merupakan proses pembaharuan yang kontinyu dan terus-menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik”

Administrasi pembangunan tidak hanya berarti kemampuan untuk menetapkan strategi pembangunan yang baik, kemudian diperinci dalam rencana-rencana dan diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan nyata yang efektif dalam pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga hendaknya dapat menimbulkan respons dan kerjasama seluruh rakyat, serta berperan melibatkan kegiatan masyarakat luas sesuai dengan arah dan kebijaksanaan yang ditetapkan dalam proses pembangunan. Lebih jauh mengenai administrasi pembangunan adalah :

“ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien” (Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya, 1988:83).

Pakar lain, Anne Leemans dalam Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya (1988:38) administrasi pembangunan adalah :

“suatu administrasi negara yang bisa berperan sebagai agen perubahan (*agent of change/management of change*)”

Sedangkan menurut George F. Gant dalam Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya (1988:38), administrasi pembangunan adalah :

“Administrasi mengenai kebijaksanaan, program, dan proyek untuk mendukung tujuan-tujuan pembangunan”

Untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, terdapat 5 dimensi penting dalam proses pembangunan, yaitu :

1. Kesejahteraan sosial ekonomi, terutama indikator pertumbuhan ekonomi, karena lebih mudah dihitung (*quantifiable*).
2. Dimensi transformasi sosial dari masyarakat tradisional ke arah masyarakat maju (modern).
3. Pembangunan bangsa (*nation building concept*).
4. Menempatkan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya dalam proses pembangunan.

5. Manusia sebagai pusat perhatian proses pembangunan (Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya, 1988:15-17).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dapat dipahami sebagai tindakan-tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah melalui program-program pembangunan yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang pada umumnya bersifat sosial karena berhubungan dengan kepentingan masyarakat atau publik.

Masalah publik yang terkait dengan program-program pembangunan dapat diatasi dengan meningkatkan kemampuan dan ekonomi rakyat, sehingga akan dapat membuat masyarakat mampu menanggulangi masalah dengan kemampuannya sendiri. Dampak dari adanya proses pembangunan telah menyebabkan masalah lingkungan, sehingga dibutuhkan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan atau tidak merusak lingkungan, yaitu pembangunan yang bijaksana yang akan menaikkan kualitas lingkungan yang terdukung terlanjutkan. Konsep pembangunan tersebut perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal, karena manusia berinteraksi, mempengaruhi dan dipengaruhi, membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya (Soemarwoto, 2001:54). Pemerintahan yang baik akan tercapai melalui proses pembangunan yang seimbang.

Pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas, meliputi :

1. Pengelolaan lingkungan secara rutin
2. Perencanaan dini pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntunan bagi perencanaan pembangunan
3. Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan
4. Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena sebab alamiah maupun karena tindakan manusia (Soemarwoto, 2001:96).

Di dalam kebijakan publik terdapat suatu siklus yang bersifat berkesinambungan antara tahap yang satu dengan tahap yang lainnya. Suatu kebijakan menjadi pedoman bagi unsur pelaksana. Karena pelaksanaan perlu penyesuaian dengan waktu dan lokasi, kebijakan tidak boleh kaku (*rigid*) seperti

Universitas Indonesia

petunjuk pelaksanaan. Oleh karena itu kebijakan berada pada tahap level strategis, artinya suatu kebijakan tidak boleh bersifat teknis (Winarno, 2002:28).

Tahapan-tahapan dalam siklus kebijakan yaitu :

1. *Agenda Setting*

Tahap pertama dalam merumuskan suatu kebijakan publik adalah identifikasi atau perumusan masalah (*defining problem*). Hal tersebut ditujukan untuk menemukan kasus-kasus (alternatif-alternatif kebijakan) yang menyangkut kepentingan umum di dalam masyarakat yang memerlukan regulasi. Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan suatu kebijakan karena untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Hal tersebut penting karena pada dasarnya kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat.

Masalah-masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai-nilai, atau kesempatan-kesempatan yang tidak atau belum terealisasi yang akan dapat dicapai dengan mengaplikasikannya menjadi sebuah kebijakan. Identifikasi masalah menjadi sistem penunjuk pokok atau mekanisme pendorong yang mempengaruhi keberhasilan semua fase analisis kebijakan dewasa ini karena tahap identifikasi menjadi pintu pengantar sebuah pembentukan kebijakan.

Dalam fase ini, para pejabat publik harus terjun secara langsung atau paling tidak dekat dengan masyarakat untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi masalah publik dan memerlukan pemecahan regulasi kebijakan publik. Hal-hal tersebut misalnya pendidikan, kesehatan, transportasi, sarana umum, pelayanan jasa, ketertiban umum, perizinan, dll kemudian akan menjadi materi pokok (input) pembahasan pejabat publik dalam penyusunan agenda kebijakan. Namun tidak semua masalah dapat diaplikasikan menjadi kebijakan. Tugas identifikasi adalah mengumpulkan masalah-masalah tersebut secara umum, lalu pada tahap selanjutnya akan ada penyeleksian dan penyusunan prioritas masalah untuk menentukan masalah mana yang akan diangkat, dibahas, dan dibuat kebijakannya.

Universitas Indonesia

Pada tahapan ini, dilakukan pemberian informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah, sehingga dapat diketahui penyebab timbulnya suatu masalah atau isu-isu yang menjadi perhatian publik dan dapat diketahui sifat serta tipe masalah publik. Setelah mengidentifikasi masalah maka para pejabat pemerintah yang terkait dapat menempatkan masalah tersebut pada agenda publik. Dalam hal ini dikenal dengan istilah *agenda setting*.

2. *Policy Formulation*

Tahap formulasi adalah tahap dimana para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif kebijakan sebagai pemecahan masalah yang ada. Tahap ini ada setelah para perumus kebijakan sepakat untuk memasukan masalah tersebut dalam agenda kebijakan.

Pada tahapan ini, dilakukan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kebijakan dimasa yang akan datang. Dalam hal ini pejabat pemerintah dapat memprediksikan berbagai konsekuensi dengan dikeluarkannya kebijakan. Selain itu, pada tahapan ini pejabat pemerintah dapat melakukan kegiatan pengawasan untuk mempengaruhi perubahan dalam kebijakan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi resiko yang lebih besar.

3. *Policy Implementation*

Kebijakan publik merupakan respons dari sebuah sistem politik terhadap tuntutan maupun dukungan yang mengalir dari lingkungannya. Pemerintah sebagai pelaku utama implementasi kebijakan publik memiliki dua fungsi yang berbeda, yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik merupakan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sedangkan fungsi administratif adalah fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Pada tahapan ini, dilakukan beberapa alternatif kebijakan sehingga didapat keuntungan atau manfaat dari alternatif kebijakan yang ditawarkan.

4. *Policy Change*

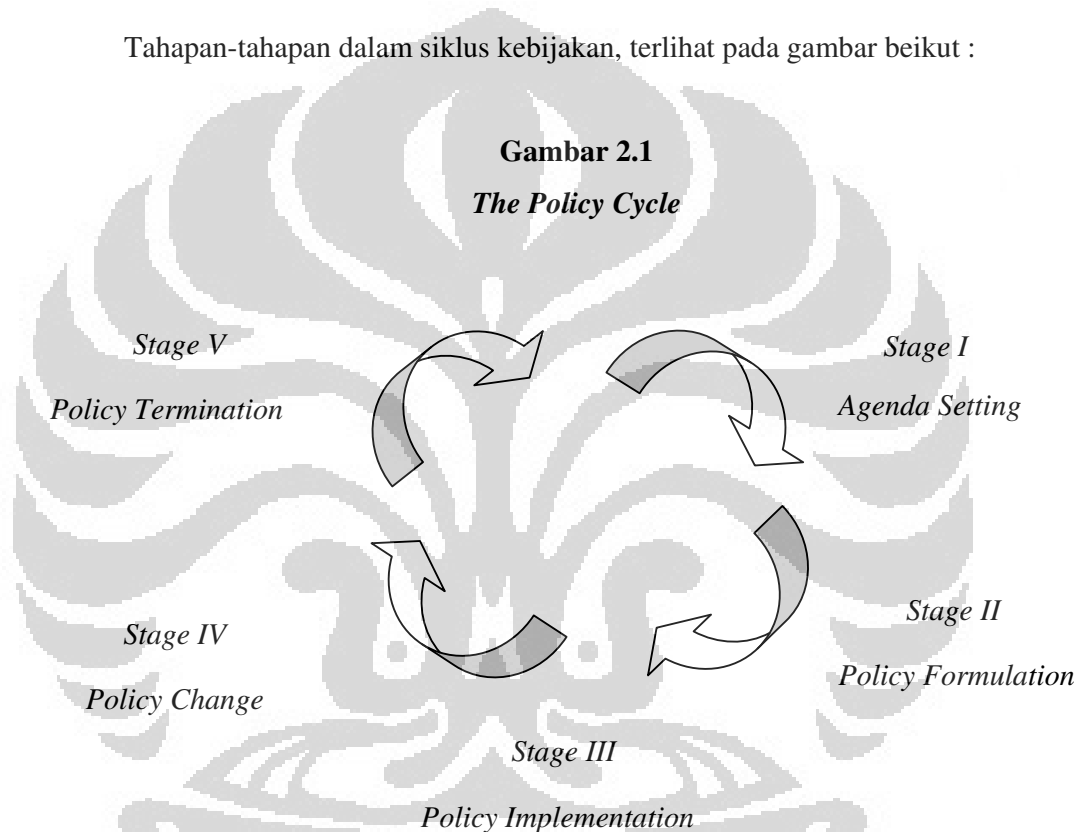
Pada tahapan ini, *monitoring* kebijakan dilakukan ketika kebijakan sedang diimplementasikan. Dengan adanya *monitoring* terhadap kebijakan

akan diketahui kesalahan-kesalahan awal yang kemudian diketahui untuk dilakukan tindakan perbaikan.

5. *Policy Termination*

Pada tahapan ini, evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai bagaimana tingkat kinerja dari suatu kebijakan. Selain itu, dengan evaluasi kebijakan dapat diketahui berapa besar biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

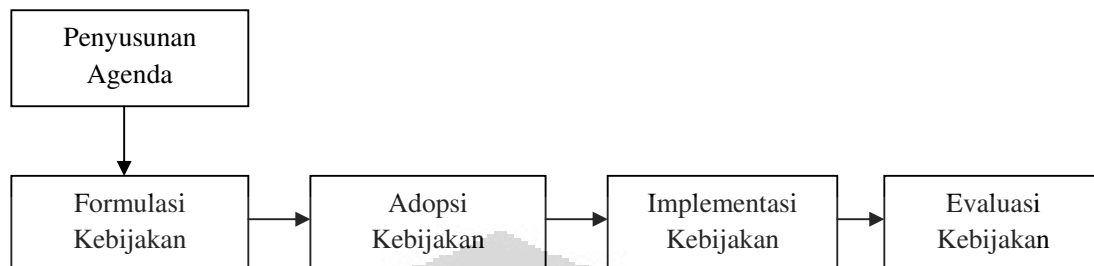
Tahapan-tahapan dalam siklus kebijakan, terlihat pada gambar berikut :



Sumber: (Lester dan Steward, 1980:7)

Namun, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Seperti merujuk pada tahap-tahap kebijakan yang ditawarkan oleh Dunn, yaitu tahap-tahap kebijakan, meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Gambar 2.2
Tahap-tahap Kebijakan



Sumber : Budi Winarno, 2007:12

Tahap Penyusunan Agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menetapkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain dibahas untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

Tahap Formulasi Kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah itu didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan ‘bermain’ untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

Tahap Adopsi Kebijakan. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

Tahap Implementasi Kebijakan. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh

karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

Tahap Penilaian Kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Setelah memahami pengertian kebijakan publik, maka salah satu tahapan dalam proses kebijakan yang menjadi fokus penelitian adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan (Abidin, 2002:189). Pada tahapan implementasi kebijakan, aparat pemerintah sebagai pembuat kebijakan memberdayakan berbagai sumber daya yang ada untuk mengidentifikasi masalah dan bagaimana cara mencapai tujuan kebijakan.

Kebijakan yang dibuat pada prinsipnya akan diimplementasikan, karena hal ini sangatlah penting. Hal ini dijelaskan oleh Udoji bahwa :

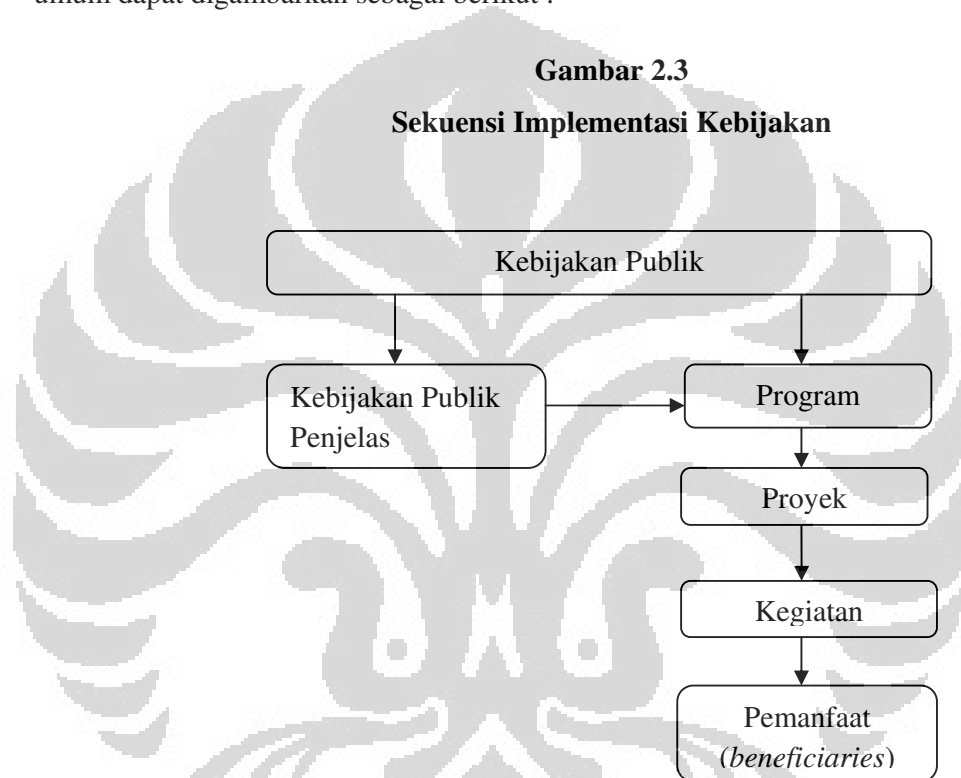
“The execution of policies is as important it not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented” (Wahab, 2004:59).

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak

diimplementasikan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih tidak kurang (Dwidjowijoto, 2008:432). Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.3
Sekuensi Implementasi Kebijakan



Sumber : (Dwidjowijoto, 2008:433)

Tahapan implementasi kebijakan merupakan tahapan yang kompleks dalam pelaksanaannya. Hal ini karena dalam implementasi kebijakan melibatkan berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok di pemerintah. Berbagai pihak yang terkait tersebut merupakan aktor-aktor yang berperan penting dalam mencapai tujuan kebijakan. Keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi kebijakan, Ripley dan Franklin (1986:11) mengemukakan :

“ Implementation process involve many important actors holding diffuse and competing goals and expectation who work within a context of an increasingly large and complex mix of government programs that

require participation from numerous layers and units of government and who are affected by powerful factors beyond their control”

Salah satu ciri yang perlu dimiliki oleh setiap kebijakan yang baik adalah kemampuan untuk memadukan birokrasi badan-badan implementor yang efektif dan efisien mungkin dan bentuknya sesederhana mungkin sehingga memudahkan implementor dan kelompok sasaran dalam berhubungan. Pembagian kerja di antara sesama petugas dalam implementasi kebijakan memiliki peranan dan dukungan serta prioritas utama dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Dalam teorinya, Grindle dalam Subarsono (2008:93) membagi dua poin penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu, isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of policy*). *Content of policy* menurut Grindle adalah *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), *Type of Benefit* (tipe manfaat), *Extent of Change Envisioned* (derajat perubahan yang ingin dicapai), *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan), *Program Implementer* (pelaksana program), *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan). Sedangkan *Context of Policy* adalah *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) (Agustino, 2006:154-156).

Secara umum, keberhasilan implementasi sebuah kebijakan dapat ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri atas kondisi kebijakan yang dilaksanakan dan faktor pendukung, sedangkan faktor eksternal terdiri atas kondisi lingkungan dan pihak terkait (Abidin, 2002:189). Faktor internal pertama yakni kondisi kebijakan. Kondisi kebijakan ini sangat terkait erat dengan kualitas kebijakan dan ketepatan strategi pelaksanaannya. Suatu kebijakan dikatakan berkualitas jika kebijakan tersebut mempunyai elemen tujuan, *desirable*, asumsi yang digunakan realistis dan informasi yang lengkap serta akurat. Sedangkan ketepatan strategi lebih kepada bagaimana kemampuan untuk bisa menyebarkan dampak positif dari sebuah kebijakan, tingkat advokasi sebuah kebijakan, serta tingkat antisipasi yang baik

untuk bisa menghadapi perubahan kondisi lingkungan.

Faktor internal kedua yakni faktor pendukung. Dalam manajemen publik, terdapat sedikitnya enam faktor pendukung yang sedikit berbeda dengan 6 M dalam sektor bisnis (*Men, Money, Material, Machine, Method and Market*). Faktor pendukung yang terdapat didalam sektor publik di antaranya ialah SDM, keuangan, logistik, informasi, legitimasi dan partisipasi. Berlanjut dari faktor eksternal yaitu keadaan lingkungan dan pihak terkait. Keadaan lingkungan dan pihak yang menjadi faktor penentu keberhasilan dari pengimplementasian sebuah kebijakan antara lain terdiri dari: kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki oleh kelompok masyarakat, serta kesepakatan dan kemampuan para pejabat pelaksana kegiatan.

Implementasi kebijakan tidak terlepas dari adanya risiko kegagalan. Risiko kegagalan ini dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu tidak terimplementasikan (*non implementation*) dan implementasi yang tidak berhasil (*unsuccessful implementation*). Menurut Hogwood and Gun, dalam Wahab (1990:51) biasanya kebijakan yang memiliki risiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor-faktor pelaksanaannya yang tidak baik (*bad execution*), kebijakannya sendiri memang yang tidak baik (*bad policy*), atau kebijakan itu memang bernasib tidak baik (*bad luck*).

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai implementasi kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses dalam pelaksanaan kebijakan yang melibatkan aktor pembangunan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Namun, disamping itu dalam proses implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan sebagai faktor keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan, dalam hal ini kebijakan publik (*public policy*) merupakan proses pembentukan masalah pemerintah, pemecahannya, penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijaksanaan (Thoha, 1997:51). Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, administrasi negara dan administratornya relatif berdasarkan undang-undang dan peraturan (memberikan warna legalistik), sehingga perubahan atau

perluasan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya sulit atau lambat menyesuaikan diri pada tuntutan-tuntutan masyarakat. Berbeda dengan organisasi swasta yang dengan mudah dan cepat dapat menyesuaikan diri apabila didapatkan kritik atau saran dari pelanggan (Thoha, 1997:44).

Implementasi kebijakan yang akan dikaji adalah peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk mengelola sampah sehingga dapat meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan, dan tercipta kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkualitas.

2.2.3 Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah)

Desentralisasi adalah istilah teknis yang populer dalam ilmu sosial. Bagaimanapun, beberapa masalah telah terjadi dalam merumuskan definisi desentralisasi yang tepat, karena beberapa cabang ilmu sosial telah mengangkat terminologi (desentralisasi) dalam konteks dan kepentingannya (Conyers, dalam buku Herman Hidayat, 2008:137).

Smith (1985) dalam Hidayat (2008:137) mendefinisikan desentralisasi dari perspektif politik sebagai :

“pengalihan kekuasaan dari pemerintahan pusat ke lokal, yakni dari tingkatan atas ke lebih rendah dalam *hirarchi teritorial*, maka devolusi kekuasaan adalah substansi utama desentralisasi dan tidak terbatas pada susunan pemerintahan”.

Sementara Rondinelli dan Cheema (1983) mendefinisikan desentralisasi dengan pandangan yang lebih luas, termasuk perspektif administrasi. Desentralisasi dinyatakan sebagai :

“pengalihan perencanaan, pembuatan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintahan pusat kepada unit administrasi lokal, semi otonomi, atau organisasi non-pemerintahan” (Hidayat, 2008:137).

Desentralisasi saat ini telah menjadi azas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Penerimaan tersebut disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah (Prasojo, Maksum dan Kurniawan : 2006:1).

Desentralisasi mengandung arti bahwa urusan-urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagian diserahkan kepada badan/lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah (Koswara, 1995:69).

Pemerintah daerah dapat diberi penyerahan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu untuk diselenggarakan pada tingkat daerah, tetapi harus juga diperhatikan kemungkinan daerah untuk menggali dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaannya, dan juga tersedianya tenaga-tenaga pemerintahan yang cukup dan mampu pada tingkat daerah, agar pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi atau desentralisasi secara baik. Adapun Sumber-sumber pembiayaan tersebut antara lain diperoleh dari :

1. Pendapatan dan melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau yang bukan menjadi kewenangan perpajakan pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah.
2. Penerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah (misalnya retribusi, tariff perizinan tertentu).
3. Pendapatan-pendapatan daerah yang diperoleh dari keuntungan perusahaan-perusahaan daerah, yaitu perusahaan-perusahaan yang mendapatkan modal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan daerah (merupakan bagian dari kekayaan negara).
4. Penerimaan daerah dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan ini dimaksudkan sebagai bagian penerimaan tertentu dari pajak-pajak yang dipungut pemerintah pusat dan kemudian diserahkan kepada daerah. Untuk masing-masing daerah berbeda-beda persentase penerimaannya, karena kriteria kondisi daerah yang berbeda-beda.
5. Pendapatan daerah karena pemberian subsidi secara langsung atau yang penggunaannya ditentukan (*earmarked*) untuk daerah tersebut. Contoh pelaksanaan instruksi-instruksi presiden mengenai bantuan-bantuan tertentu kepada daerah untuk maksud-maksud pembangunan daerah.

6. Pemberian bantuan dari pemerintah pusat yang bersifat khusus karena keadaan-keadaan tertentu atau ganjaran.
7. Penerimaan-penerimaan daerah yang didapat dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah (Tjokroamidjojo, 1981:160-161).

Desentralisasi merupakan hak mutlak Pemerintah Daerah dan masyarakatnya untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah atau masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan aspirasinya. Desentralisasi merupakan bentuk pengakuan eksistensi dan kemandirian daerah. Jadi hakekat dari desentralisasi adalah tercapainya upaya pemberdayaan rakyat baik langsung maupun melalui wakil-wakilnya, terwujudnya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat, tercapainya pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan (pengambilan keputusan), terwujudnya birokratisasi yang makin berkurang, adanya penyerahan urusan kepada daerah, pusat pengambilan keputusan makin dekat kepada obyek pembangunan dan kepala daerah hanya bersifat sebagai pelaksana pembangunan atas hasil rumusan kebijakan yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil masyarakat. Dengan demikian desentralisasi memiliki tujuan yang berkaitan dengan demokrasi, partisipasi, stabilitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan (Sasongko, 2005:97).

Terdapat beberapa konsep/permasalahan yang melatarbelakangi munculnya desentralisasi dan otonomi daerah :

1. Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem Negara berdasarkan kedaulatan rakyat yang selanjutnya melahirkan asas demokrasi dan desentralisasi dalam pemerintahan Negara.
2. Sistem sentralisasi tidak menciptakan *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak ada pengawasan masyarakat yang berarti.
3. Kurang mampunya Pemerintah Daerah dalam mengakomodasi fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien.
4. Masyarakat yang merupakan pemilik otonomi daerah belum memperoleh manfaat sesuai dengan harapan.

5. Luasnya wilayah Negara Indonesia yang harus dikelola sehingga perlu *power sharing* yang direfleksikan dalam otonomi daerah.
6. Kegagalan pemerintah dengan pendekatan sentralisasi telah mengalihkan perhatian rakyat Indonesia kepada pendekatan desentralisasi.

Desentralisasi dan otonomi daerah saling terkait satu sama lain. Pertama, desentralisasi memperkuat otonomi daerah, karena otonomi daerah merupakan manifestasi dari adanya konsep desentralisasi. Kedua, desentralisasi mempersoalkan pembagian wewenang kepada organ-organ penyelenggaraan negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut (Koswara, 1995:40).

Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan. Secara umum tujuan tersebut dapat diklasifikasikan kedalam dua variabel penting, yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (yang merupakan pendekatan *structural efficiency model*) dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan (yang merupakan pendekatan *local democracy model*). Menurut Smith (1985) dalam Prasajo, Maksun dan Kurniawan (2006:17) tujuan utama tersebut dapat diuraikan ke dalam beberapa tujuan, yaitu:

1. Pendidikan Politik
2. Latihan Kepemimpinan Politik
3. Stabilitas Politik
4. Kesamaan Politik
5. Akuntabilitas
6. Daya Tanggap (Responsivitas)
7. Efisiensi dan Efektivitas

Tujuan desentralisasi secara prinsip adalah “antitesis” untuk sentralisasi, karena sentralisasi mendorong penyatuan kekuasaan politik ke dalam kewenangan pemerintahan pusat. Desentralisasi adalah penyebarluasan kekuasaan dan kewenangan pada tingkat pemerintahan lokal (Hidayat, 2008:138).

Sedangkan Emil J. Sady (1961) dalam Tjokroamidjojo (1981:82), tujuan desentralisasi adalah :

1. Mengurangi beban pemerintah pusat, dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil pada tingkat lokal. Demikian pula memberikan peluang untuk koordinasi pelaksanaan pada tingkat lokal.
2. Meningkatkan pengertian rakyat seta dukungan mereka dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi. Demikian pula pada tingkat lokal, dapat merasakan keuntungan daripada kontribusi kegiatan mereka.
3. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis.
4. Melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya sendiri (*self government*).
5. Pembinaan kesatuan nasional.

Desentralisasi dan otonomi daerah dilahirkan dari pembagian kekuasaan pemerintahan secara vertikal dan pada hakekatnya merupakan komplementer (pelengkap) dari pembagian kekuasaan secara horizontal yang melahirkan kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Secara horizontal pembagian kekuasaan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan (*Balance of Power*) dalam penyelenggaraan negara antara organ yang membuat Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya (legislatif), organ yang melaksanakan Undang-Undang (eksekutif) dan organ yang menjadi pengawas dalam pelaksanaan Undang-Undang. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal adalah konsensus untuk menciptakan keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Soenyono (2001:105) dalam Malarangeng, (2001:105) otonomi daerah merupakan fenomena politik yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi, demokratisasi, dan reformasi saat ini, sebagai bagian dari sistem politik yang diharapkan dapat memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu menyumbangkan daya kreatifitasnya agar tidak mengalami kesulitan menempatkan diri sejajar dengan negara-negara lain.

Pengertian otonomi secara umum, yakni ada kewenangan yang melekat pada sesuatu organisasi atau unit dalam organisasi, untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu. Dalam konteks pemerintahan, otonomi biasanya dilihat dari tiga dimensi (Silalahi, 2002:30), yaitu:

1. Otonomi negara dalam berhubungan dengan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat (terutama masyarakat ekonomi dan partai politik).
2. Otonomi pemerintah daerah dalam hubungan dengan pemerintah pusat.
3. Otonomi unit-unit bawahan dalam organisasi pemerintahan dalam hubungan dengan unit yang lebih tinggi.

Desentralisasi akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakat daerah, jika otonomi daerah dipahami sebagai otonomi masyarakat daerah bukan hanya otonomi pemerintahan daerah. Sehingga, otonomi daerah sebesar-besarnya harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan menentukan sendiri arah pertumbuhan, termasuk perubahan sistem yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut. Karena itu proses yang partisipatif, yang melibatkan seluruh *stakeholder* dalam otonomi daerah menjadi prasyarat utama kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Prasojo, Maksum dan Kurniawan, 2006:23).

Oleh karena itu, pilihan strategis pemerintahan daerah lebih banyak berorientasi pada kenyataan lokal, berbeda dengan pemerintahan yang berorientasi pada *stakeholder* tingkat yang lebih tinggi (sentralistik). Orientasi pembangunan dalam tata organisasi desentralisasi, ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dan memperkuat pemerintahan daerah dalam pelayanan kepada masyarakatnya dengan pola '*good governance*'.

Bertolak dari prinsip *good governance* pengukuran tingkat desentralisasi di bidang pembangunan perkotaan dapat dilihat dari kriteria :

1. Transparansi pembangunan perkotaan;
2. Demokratisasi pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan perkotaan;

3. Pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan perkotaan;
4. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan pembangunan perkotaan;
5. Percepatan dan ketepatan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan perkotaan;
6. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan kota;
7. Keadilan bagi setiap warga kota dan aparaturnya.

Tujuan yang hendak dicapai dalam pemberian otonomi daerah adalah terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata berarti bahwa pemberian otonomi kepada daerah adalah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan, tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata untuk mampu mengurus rumah tangga di daerahnya.

Sedangkan otonomi yang dinamis berarti pemberian otonomi kepada daerah yang didasarkan pada situasi, kondisi dan perkembangan pembangunan. Bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu memperlancar pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara tanpa ada pertentangan antara kebijaksanaan yang diberikan oleh pemerintah daerah (serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah), serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah, serta pelaksanaan operasional yang dilaksanakan oleh daerah penerima otonom, sehingga pembangunan daerah merupakan rangkaian pembangunan nasional secara menyeluruh (Silalahi, 2002:11). Sehingga pemberian otonomi daerah merupakan suatu prasyarat untuk terciptanya suatu pembangunan daerah dan nasional yang *sustainable*, dengan didukung oleh suatu lingkungan yang demokratis.

Penentuan daerah-daerah yang diberi hak otonomi tidaklah mudah. Hal ini menyangkut banyak aspek, politik, ekonomi, administrasi, sosial budaya, dan lain-lain. Keserasian pembangunan wilayah dalam sistem desentralisasi dan otonomi daerah dapat dilakukan dengan (Maskun, 2002:235) :

1. Terwujudnya di daerah realisasi kebijaksanaan pusat dan daerah secara sinkron dan saling mendukung dalam proses pembangunan daerah.
2. Penyelenggaraan secara efektif peraturan perundangan daerah yang melandasi secara hukum pelaksanaan pembangunan di daerah.
3. Terwujudnya hubungan kegiatan fungsional di daerah antara instansi terkait di kalangan birokrasi di daerah, dan antara birokrasi daerah dengan masyarakat *entrepreneur* di bidang-bidang sosial-budaya, ekonomi dan politik.
4. Terbinanya daerah, dengan dasar potensi dan kemampuan daerah.

Kewenangan yang lebih mandiri dan bersifat homogeny dan integral adalah berupa otonomi yang diberikan kepada masing-masing daerah dalam rangka menciptakan kemandirian kesatuan wilayah pemerintahan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dengan lebih berorientasi kepada kondisi daerah dan tuntutan kebutuhan masyarakat daerah setempat. Kewenangan otonomi adalah kewenangan pangkal dan dasar pada sesuatu kesatuan pemerintahan daerah yang memiliki fleksibilitas yang fungsional dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan otonomi merupakan sumber kewenangan perencanaan pembangunan di daerah dan yang mampu menciptakan spesifikasi penyelenggaraan pemerintahan atas sesuatu wilayah baik atas dasar pertimbangan-pertimbangan fisik, sosial, ekonomi maupun budaya (Maskun, 2002:231).

Dalam konteks desentralisasi pembangunan perkotaan, maka kewenangan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pembangunan perkotaan sebagian besar diserahkan dan menjadi tanggung jawab Daerah. Pemerintah daerah dan wakil-wakil rakyatnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berhak untuk berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan perkotaan.

Masyarakat Daerah secara langsung terlibat dalam proses perencanaan, dimana Pemerintah Daerah dan DPRD siap menampung dan memenuhi berbagai aspirasi seluruh lapisan masyarakat di daerahnya. Dalam artian politik, kondisi

dimaksud merupakan upaya pendemokrasian daerah, melalui pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Pada gilirannya, masyarakat yang tadinya hanya '*terima jadi*' berbagai kebijakan yang datang dari Pusat atau yang lebih tinggi, yang jauh dari jangkauan pandangan, akan dapat melihat secara langsung proses perencanaannya (Sibero, 1991:49).

Desentralisasi pembangunan perkotaan berarti pemberian otonomi atau penyerahan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya daerah dalam penyelenggaraan pembangunan perkotaan yang mandiri dan dilandasi prinsip-prinsip demokrasi, keberdayaan masyarakat, dunia usaha dan aparat pemerintah daerah, sehingga tercapainya pemerataan dan keadilan, melalui optimalisasi daya guna dan hasil guna potensi inti serta keanekaragaman daerah dalam ikatan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sasongko, 2005:112).

Penerapan kebijakan ini memerlukan adanya pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pola pengelolaan pembangunan perkotaan.

Arah dan pelaksanaan pembangunan kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pada masa mendatang, dengan tantangan dan masalah yang dihadapi kota-kota (masalah lingkungan, masalah sosial, dan lain-lain), adanya kekuatan yang mempengaruhi perkembangan kota (globalisasi, urbanisasi), adanya keterkaitan antar kota dan desa, bagaimana penyelenggaraan pembangunan oleh daerah dapat sinkron dan sinergis serta mendukung pembangunan nasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tahapan yang penting dalam sebuah proses dan kegiatan penelitian. Metode adalah cara kerja untuk dapat memahami objek atau subjek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi tujuan dapat dipahami lebih mendalam sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang akurat, objektif, valid, dan reliable.

Metode penelitian merupakan totalitas cara untuk meneliti dan menemukan kebenaran (Irawan, 2004:54-55). Karena metode penelitian memiliki standar-standar yang objektif dan ilmiah sebagai suatu dasar bagi penelitian yang digunakan peneliti untuk menginterpretasikan data dan membuat kesimpulan sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sebagai keseluruhan proses dari kajian atau penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975), dalam Moloeng (2004:3) penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini digunakan peneliti untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan pasca pemekaran daerah dari Kabupaten Tangerang. Berdasarkan penjelasan tentang pendekatan kualitatif maka nantinya akan didapat kebenaran yang bersifat intersubjektif yaitu kebenaran yang dipersepsikan sebagai bangunan (konstruksi) yang disusun oleh peneliti dengan cara mencatat dan memahami apa yang terjadi di dalam interaksi sosial kemasyarakatan (Irawan, 2006:5).

3.2 Jenis Penelitian

3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu fenomena atau gejala (Prasetyo dan Jannah, 2005:42). Penelitian deskriptif ini diidentikkan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan “bagaimana” dalam mengembangkan informasi yang ada. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 2003,54). Dalam penelitian deskriptif, terdapat suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengungkapkan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiono, 2005:35). Penelitian deskriptif dilakukan terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta. Seperti halnya penelitian ini yang berupaya untuk mengungkapkan fakta berupa masalah dan peristiwa yang terjadi di lapangan, yaitu implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan pasca pemekaran daerah dari Kabupaten Tangerang.

3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian murni. Penelitian murni merupakan penelitian yang manfaatnya dirasakan untuk waktu yang lama, karena kebutuhan peneliti sendiri. Penelitian murni ini mencakup penelitian-penelitian dalam kerangka akademis yaitu skripsi, tesis, atau disertasi (Prasetyo dan Jannah, 2005,38).

3.2.3. Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan penelitian *cross sectional*, karena penelitian ini dilakukan pada satu waktu tertentu. Menurut Prasetyo dan Jannah (2005:45), penelitian *cross sectional* adalah penelitian yang dilakukan dalam waktu tertentu dan tidak akan dilakukan

penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. Penelitian ini dalam mengambil data pada periode yang sama untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan pasca pemekaran daerah dari Kabupaten Tangerang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiono, 2005:62). Teknik pengumpulan data digunakan sebagai teknik penelitian untuk mencari dan menentukan informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan informasi yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian secara obyektif (Malo dan Trisnoningtiyas, tanpa tahun:201).

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan, oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori (Sugiono, 2005:3). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder dengan cara :

1. Studi Lapangan

Dilakukan untuk mendapatkan data-data primer mengenai kebijakan pengelolaan sampah, analisis implementasi kebijakan, hambatan-hambatan yang ditemui dalam implementasi kebijakan tersebut, serta analisis kewenangan yang dimiliki daerah pasca pemekaran. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara terbuka dengan informan penelitian. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Stainback (1988) dan Sugiono (2005:72) mengemukakan bahwa :

"interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomenon than can be gained through observational alon"

Jadi, dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

2. Studi Literatur

Peneliti memperoleh data sekunder dengan menggunakan studi literatur dan dokumen untuk mendukung data primer yang diperoleh di lapangan. Studi literatur dilakukan dengan melakukan studi terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, internet, serta dokumen-dokumen instansi yang terkait dengan penelitian ini.

3.4 Metode dan Strategi Penelitian

Penelitian kualitatif mempunyai perbedaan-perbedaan yang mendasar dengan penelitian kuantitatif. Perbedaan tersebut berhubungan dengan paradigma dan tujuan penelitian, metode penelitian, serta pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, dan juga tidak ada panduan baku untuk melakukan analisis data (Irawan, 2007:70).

Penelitian menggunakan analisis kualitatif dalam memahami data yang diperoleh. Dengan melakukan analisis kualitatif, peneliti dapat memfokuskan penelitian pada penunjukan makna, deskripsi dan penempatan data pada konteksnya masing-masing.

3.5 Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang akan memberikan informasi dan data yang selanjutnya akan di analisis. Oleh karena itu, pemilihan informan merupakan faktor yang penting dalam melakukan penelitian. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan pasca pemekaran daerah dari Kabupaten Tangerang. Informan yang dipilih yaitu :

1. M.Nur Slamet, Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan

2. Saiful, Kepala Pasar Jombang
3. Odih Supriyatna, Kepala Pasar Ciputat

3.6 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat terjadinya suatu fenomena atau aktivitas. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah Kota Tangerang Selatan, khususnya Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP).

3.7 Pembatasan Penelitian

Pembatasan penelitian dilakukan untuk mempersempit ruang kajian penelitian, sehingga, penelitian akan lebih fokus dan menghindari pembahasan yang terlalu luas. Pembatasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dalam hal pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan pasca pemekaran daerah.

3.8 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang muncul dalam penelitian ini adalah sulitnya waktu bertemu dengan informan untuk wawancara dengan alasan kesibukan tugas dari informan, ditambah dengan adanya kegiatan Pemilukada (Pemilihan Kepala Daerah) Kota Tangerang Selatan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota di Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang.

4.1.1 Sejarah Pembentukan Kota Tangerang Selatan

Pada masa penjajahan Belanda, wilayah ini masuk ke dalam Karesidenan Batavia dan mempertahankan karakteristik tiga etnis, yaitu Suku Sunda, Suku Betawi, dan Suku Tionghoa. Pembentukan wilayah ini sebagai kota otonom berawal dari keinginan warga di kawasan Tangerang Selatan untuk menyejahterakan masyarakat. Warga merasa kurang diperhatikan Pemerintah Kabupaten Tangerang sehingga banyak fasilitas terabaikan. Pada tahun 2000, beberapa tokoh dari kecamatan-kecamatan mulai menyebut-nyebut Cipasera sebagai wilayah otonom.

Pada 27 Desember 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menyetujui terbentuknya Kota Tangerang Selatan. Calon kota otonom ini terdiri atas tujuh kecamatan, yakni, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Cisauk, dan Setu. Pada 22 Januari 2007, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Endang Sujana, menetapkan Kecamatan Ciputat sebagai pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan secara aklamasi.

Komisi I DPRD Provinsi Banten membahas berkas usulan pembentukan Kota Tangerang Selatan mulai tanggal 23 Maret 2007. Pembahasan dilakukan setelah berkas usulan dan persyaratan pembentukan kota diserahkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ke Dewan pada 22 Maret 2007.

Pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Tangerang menyiapkan dana

Universitas Indonesia

sebesar Rp 20 miliar untuk proses awal berdirinya Kota Tangerang Selatan. Dana itu dianggarkan untuk biaya operasional kota baru selama satu tahun pertama dan merupakan modal awal dari daerah induk untuk wilayah hasil pemekaran. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan menyediakan dana bergulir sampai kota hasil pemekaran dapat mandiri.

4.1.2 Pembagian Wilayah Administratif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 tanggal 26 November tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, secara administratif kota Tangerang Selatan terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, 49 (empat puluh sembilan) kelurahan dan 5 (lima) desa.

Menurut data Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2007/2008, luas wilayah kecamatan-kecamatan yang berada di Kota Tangerang Selatan (yang kemudian diambil sebagai luas wilayah kota Tangerang Selatan) adalah sebesar 150,78 Km², sedangkan menurut Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan adalah sebesar 147,19 Km² dengan rincian luas kecamatan masing-masing yang berbeda pula (luas wilayah masing-masing tertera dalam tabel). Angka yang digunakan adalah 147,19 Km² karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap luas kota (%)
1	Serpong	2.404	16,33%
2	Serpong Utara	1.784	12,12%
3	Ciputat	1.838	12,49%
4	Ciputat Timur	1.543	10,48%
5	Pamulang	2.682	18,22%
6	Pondok Aren	2.988	20,30%
7	Setu	1.480	10,06%
Kota Tangerang Selatan		14.719	100,00%

Sumber : Hasil Olah Potensi Desa Tahun 2006 dalam Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)

Berdasarkan tabel, kecamatan dengan wilayah paling besar adalah Pondok Aren dengan luas 2.988 Ha atau 20,30% dari luas keseluruhan Kota Tangerang Selatan, sedangkan kecamatan dengan luas paling kecil adalah Setu dengan luas 1.480 Ha atau 10,06%.

Tabel 4.2

Luas Wilayah Kelurahan/Desa Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Ha)
1.	Serpong	Buaran	334
		Ciater	376
		Rawa Mekar Jaya	235
		Rawa Buntu	328
		Serpong	139
		Cilenggang	143
		Lengkong Gudang	361
		Lengkong Gudang Timur	262
		Lengkong Wetan	226
2.	Serpong Utara	Lengkong Karya	210
		Jelupang	126
		Pondok Jagung	209
		Pondok Jagung Timur	225
		Pakulonan	279
		Paku Alam	281
		Paku Jaya	454
3.	Ciputat	Sarua	368
		Jombang	345
		Sawah Baru	274
		Sarua Indah	193
		Sawah	249
		Ciputat	172
		Cipayung	237

Universitas Indonesia

4.	Ciputat Timur	Pisangan	391
		Cireundeu	308
		Cempaka Putih	227
		Pondok Ranji	246
		Rengas	165
		Rempoa	206
5.	Pamulang	Pondok Benda	386
		Pamulang Barat	416
		Pamulang Timur	259
		Pondok Cabe Udik	483
		Pondok Cabe Ilir	396
		Kedaung	256
		Bambu Apus	220
		Benda Baru	266
6.	Pondok Aren	Perigi Baru	310
		Pondok Kacang Barat	252
		Pondok Kacang Timur	252
		Perigi Lama	389
		Pondok Pucung	362
		Pondok Jaya	233
		Pondok Aren	217
		Jurang Mangu Barat	253
		Jurang Mangu Timur	258
		Pondok Karya	271
		Pondok Betung	191
7.	Setu	Kranggan	205
		Muncul	361
		Setu	364
		Babakan	170
		Bakti Jaya	174
		Kademangan	206
Jumlah		14.719	

Sumber : Hasil Olahan Potensi Desa Tahun 2006 dalam Kompilasi Data untuk Penusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008).

Berdasarkan tabel diatas, kelurahan/desa dengan wilayah di atas empat ratus hektar terletak di Kecamatan Pamulang, yaitu Pondok Cabe Udik dan Pamulang Barat, dan di Kecamatan Serpong Utara, yaitu Paku Jaya. Kelurahan/desa dengan wilayah di bawah seratus lima puluh hektar terletak di Kecamatan Serpong, yaitu Cilenggang dan Serpong, dan di Kecamatan Serpong Utara, yaitu Jelupang. Kelurahan/desa dengan luas wilayah paling besar adalah Pondok Cabe Udik dengan luas 483 Ha sedangkan kelurahan/desa dengan luas wilayah paling kecil adalah Jelupang dengan luas 126 Ha.

Tabel 4.3
Jumlah Kelurahan dan Desa per Kecamatan
Kota Tangerang Selatan Tahun 2009

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
1	Serpong	9	-	69	337
2	Serpong Utara	7	-	65	272
3	Ciputat	7	-	92	460
4	Ciputat Timur	6	-	75	416
5	Pamulang	8	-	129	690
6	Pondok Aren	11	-	113	677
7	Setu	1	5	29	144
	Jumlah	49	5	572	2.996

4.1.3 Kondisi Geografis dan Iklim

Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yang secara administratif terdiri dari 7 kecamatan, 49 kelurahan dan 5 desa dengan jumlah penduduk sekitar 1.241.441 jiwa, sehingga memenuhi syarat untuk suatu daerah otonom.

Tabel 4.4

Populasi Penduduk di Kota-kota Besar Indonesia

Kota	Provinsi	Populasi
Jakarta	DKI Jakarta	8.839.247

Surabaya	Jawa Timur	2.611.506
Bandung	Jawa Barat	2.288.570
Medan	Sumatra Utara	2.029.797
Bekasi	Jawa Barat	1.940.308
Tangerang	Banten	1.451.595
Semarang	Jawa Tengah	1.352.869
Depok	Jawa Barat	1.339.263
Palembang	Sumatra Selatan	1.323.169
Tangerang Selatan	Banten	1.241.441
Makassar	Sulawesi Selatan	1.168.258
Bogor	Jawa Barat	891.467

Sumber : RT/RW Kota Tangerang Selatan Tahun 2008

Batas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang

Tabel 4.5

Potensi Fisik Dasar Kota Tangerang Selatan

No	Potensi Fisik Dasar	Keterangan
1	Letak geografis	Di sebelah timur Propinsi Banten
2	Luas Wilayah	147,19 Km ² atau 14.719 Ha
3	Batas-batas	
	- Sebelah Utara	Kota Tangerang
	- Sebelah Timur	Provinsi DKI Jakarta
	- Sebelah Selatan	Kota Depok dan Kabupaten Bogor
	- Sebelah Barat	Kabupaten Tangerang
4	Wilayah Pemerintahan	
	- Kecamatan	7 Kecamatan
	- Kelurahan	49 Kelurahan
	- Desa	5 Desa

Sumber : RT/RW Kota Tangerang Selatan tahun 2008

Keadaan iklim di Kota Tangerang Selatan didasarkan pada penelitian di Stasiun Geofisika Klas I Tangerang, yaitu berupa data temperatur (suhu) udara, kelembaban udara dan intensitas matahari, curah hujan dan rata-rata kecepatan angin. Temperatur udara rata-rata berkisar antara 23,5 - 32,6 °C, temperatur maksimum tertinggi pada bulan Oktober yaitu 33,9 °C dan temperatur minimum terendah pada bulan Agustus dan September yaitu 22,8 °C.

Rata-rata kelembaban udara dan intensitas matahari sekitar 78,3 % dan 59,3 %. Keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari, yaitu 486 mm, sedangkan rata-rata curah hujan dalam setahun adalah 177,3 mm. Hari hujan tertinggi pada bulan Desember dengan hari hujan sebanyak 21 hari. Rata-rata kecepatan angin dalam setahun adalah 3,8 m/detik dan kecepatan maksimum 12,6 m/detik.

Tabel 4.6

Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan di Stasiun Geofisika Klas I Tangerang

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (Hari)
Januari	207	12
Februari	486	20
Maret	220	17
April	301	18
Mei	113	10
Juni	79	7
Juli	33	4
Agustus	106	4
September	1	1
Oktober	41	5
November	125	8
Desember	416	21
Rata-rata	177,3	11

Sumber : BMG, Stasiun Geofisika Klas I Tangerang dalam Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2007/2008

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Kota Tangerang Selatan mempunyai curah hujan yang cukup tinggi, sehingga mempunyai resiko terjadinya banjir. Bencana banjir merupakan masalah yang harus dihadapi oleh penduduk yang bahkan di lokasi tertentu harus dihadapi secara rutin. Lokasi rawan banjir terdapat di sepanjang beberapa sungai yang mengalir di Kota Tangerang Selatan, di antaranya Kali Angke, Kali Serua, Kali Pasanggrahan, Kali Ciputat dan Kali Kedaung.

Tabel 4.7

Lokasi Rawan Banjir di Kota Tangerang Selatan

No	Lokasi	Sungai	Kecamatan
1	Kompleks Sekretariat Negara	Kali Angke	Pondok Aren
2	Perumahan Maharta	Kali Serua	Pondok Aren
3	Taman Mangu	Kali Pasanggrahan	Pondok Aren
4	Graha Permai, Bintaro	Kali Ciputat	Ciputat
5	Perumahan Bintaro Sektor 9, Bintaro	Kali Serua	Pondok Aren
6	Kompleks Inhutani	Kali Pasanggrahan	Ciputat
7	Perumahan Pondok Hijau	Kali Ciputat	Ciputat
8	Perumahan Graha Hijau	Kali Pasanggrahan	Ciputat
9	Perumahan Reni Jaya	Kali Angke	Pamulang
10	Perumahan Bukit Pamulang Indah	Kali Kedaung	Pamulang

Sumber : RT/RW Kota Tangerang Selatan tahun 2008.

Universitas Indonesia

Bencana banjir yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, jika ditambah dengan permasalahan pengelolaan sampah yang masih belum optimal, akan semakin memperparah kondisi lingkungan. Akan tetapi, hal tersebut dibantah oleh Kepala DKPP, M. Nur Slamet yang mengatakan bahwa :

” ... kalo buat masalah banjir tidak ada kaitannya ya dengan pengelolaan sampah, kalo untuk kualitas lingkungan iya. Khusus masalah banjir yang sering terjadi di wilayah tangsel, dikarenakan adanya pengecilan sungai, dan pembangunan komplek-komplek perumahan yang tidak berwawasan lingkungan, karena pada dasarnya wilayah kita kan tinggi’ (Wawancara dengan M.Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

4.1.4 Pengelolaan Sampah

Permasalahan mengenai sampah selalu ada dalam masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampah merupakan isu lingkungan yang sering muncul terkait dengan pembangunan. Sampah merupakan suatu hal yang memiliki banyak persepsi dan definisi dari berbagai pihak. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, sampah adalah :

“sesuatu yang tidak dapat digunakan lagi, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya” (Kusnopranto, 1983:23).

Pendefinisian ini mengungkapkan bahwa sampah merupakan suatu yang tidak bernilai lagi.

“ suatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang” (Notoadmodjo, 2003:166).

Sampah juga dapat mengganggu kelangsungan hidup bila tidak dibuang dan dikelola dengan baik.

“ sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan (*refuse*) sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup. Dalam ilmu kesehatan, keseluruhan dari benda-benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang tersebut, disebut benda-benda sisa atau benda-benda bekas (*waste*)” (Azwar, 1979:53).

Berdasarkan definisi tersebut, jelas bahwa sampah merupakan hasil suatu kegiatan manusia yang dibuang. Dengan demikian, sampah mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Adanya suatu benda atau bahan padat
- b. Adanya hubungan langsung/tidak langsung dengan kegiatan manusia
- c. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi

Terdapat beberapa spesifikasi untuk melihat jenis-jenis sampah

1. Pembagian sampah atas dasar zat pembentuk
 - a. Sampah organik
 - b. Sampah non-organik
2. Pembagian sampah atas dasar sifat yang dimiliki
 - a. Sampah yang mudah membusuk
 - b. Sampah yang tidak mudah membusuk
 - c. Sampah yang mudah terbakar
 - d. Sampah yang tidak mudah terbakar
3. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, pembagian macam sampah yang juga sering dilakukan ialah gabungan dari cara pembagian di atas. Sampah dibedakan atas :

- a. *Garbage*, ialah sisa pengelolaan atau sisa makanan yang mudah membusuk. Misalnya kotoran dari dapur rumah tangga, restoran, hotel, dan lain sebagainya.
- b. *Rubbish*, ialah bahan atau sisa pengelolaan yang tidak mudah membusuk, yang dibedakan atas : yang mudah terbakar seperti kayu, kertas dan yang tidak mudah terbakar seperti kaleng, kaca.
- c. *Ashes*, ialah segala jenis bau, misalnya yang terjadi sebagai hasil pembakaran kayu, batubara di rumah-rumah maupun industri.
- d. *Dead animal*, ialah segala jenis bangkai terutama yang besar, seperti kuda, sapi, kucing, tikus. Bangkai binatang kecil seperti cicak, lipas, tidak termasuk didalamnya.

Universitas Indonesia

- e. *Street Sweeping*, ialah segala jenis sampah atau kotoran yang berserakan di jalan, karena dibuang oleh pengendara mobil ataupun oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- f. *Industrial Waste*, ialah benda-benda padat sisa yang merupakan sampah hasil industry. Misalnya industri kaleng dengan potongan-potongan sisa kaleng yang tidak dapat dipergunakan.

Di tahun 1970, *American Public Works Association* (APWA) telah mendefinisikan sampah. Selain menganggap sampah sebagai barang tak berguna, APWA menerangkan pula mengenai bentuk dari sampah, yaitu :

“ waste refer to useless, unused, unwanted or discarded materials. Waste include solids, liquid and gases. The term refuse refer to solid waste and the two are used more or less synonymous ”

(sampah merujuk pada sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak digunakan, tidak diinginkan atau barang yang dibuang. Sampah meliputi padat, liquid, dan gas. Istilah *refuse* merujuk pada sampah padat dan keduanya digunakan kurang lebih searti).

Berdasarkan definisi tersebut, sampah merupakan benda yang tidak bermanfaat, tidak digunakan, tidak diinginkan/dibuang. Sampah dapat berbentuk padat, cair dan gas. Sampah yang tidak dikelola dengan baik tentunya akan memberikan dampak negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung pada masyarakat. Beberapa dampak tersebut ialah banyaknya serangga yang muncul di timbunan sampah, sehingga menimbulkan berbagai gangguan kesehatan (menimbulkan penyakit). Sampah juga dapat mengakibatkan kebakaran jika ada kegiatan pembakaran sampah yang tidak diawasi dengan baik, selain menyebabkan polusi udara, air (jika dibuang di perairan) yang akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan.

Sampah dapat berasal dari berbagai macam sumber. Azwar (1990:54) mengelompokkan sumber-sumber sampah, diantaranya :

1. dari rumah tangga
2. dari daerah pemukiman
3. dari daerah perdagangan
4. dari daerah industri
5. dari daerah peternakan

6. dari daerah pertanian
7. dari daerah pertambangan
8. dari jalan dan lain sebagainya

Tergantung dari sumber-sumber diatas, maka jumlah sampah yang dihasilkan juga berbeda. Pada umumnya, jumlah sampah ditentukan berdasarkan kebiasaan hidup, musim atau waktu, standar hidup, dan macam masyarakat.

Sampah merupakan barang yang sangat merisaukan tetapi dapat pula sebaliknya, bila sampah dapat dikelola dengan baik, maka akan memberikan manfaat bagi manusia. Untuk mencapai adanya pemanfaatan sampah yang efektif, diperlukan suatu pengelolaan sampah yang baik sehingga sampah tidak memberikan efek merugikan untuk masyarakat.

Terdapat beberapa cara untuk melakukan pengelolaan sampah, meliputi 3 hal, (Azwar, 1979:56-58) yaitu :

1. Penyimpanan sampah (*refuse storage*)

Penyimpanan sampah maksudnya ialah tempat sampah sementara, sebelum sampah tersebut dikumpulkan, untuk kemudian diangkut serta dibuang (dimusnahkan). Sebaiknya sampah dalam penyimpanan sementara ini telah mengalami pemilahan yakni sampah basah dan sampah kering.

2. Pengumpulan sampah (*refuse collection*)

Sampah yang disimpan sementara (di rumah, kantor, restoran,dll) perlu dikumpulkan untuk kemudian diangkut dan dibuang atau dimusnahkan. Penanganan masalah sampah ini dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat secara gotong-royong. Seperti dalam penyimpanan sementara, dalam pengumpulan sampah ini juga dilakukan pemilahan/pemisahan. Ada 2 sistem yang terkenal dalam pemisahan ini, yakni :

- a. Sistem duet, artinya disediakan dua tempat sampah, yang satu untuk sampah basah dan lainnya untuk sampah kering
- b. Sistem trio, yakni disediakan tiga bak sampah, yang pertama untuk sampah basah, sampah kering yang mudah terbakar dan sampah

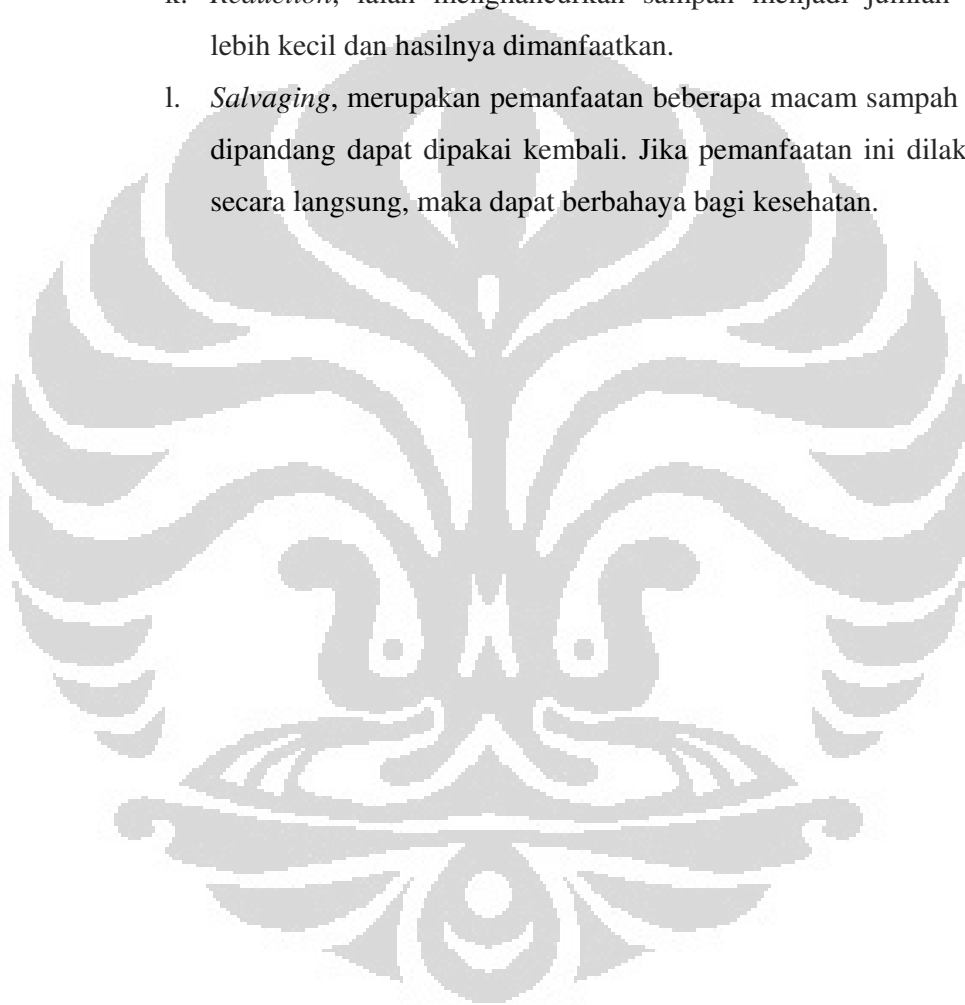
kering yang tidak mudah terbakar (seperti kaleng, kaca, dan lainnya)

3. Pembuangan sampah

Sampah yang telah dikumpulkan selanjutnya perlu dibuang untuk dimusnahkan. Terdapat beberapa sistem yang digunakan, yaitu :

- a. *Hog feeding*, merupakan teknik untuk memusnahkan sampah dengan membuatnya menjadi makanan babi. Penggunaan sampah jenis *garbage* untuk makanan babi telah banyak dikenal. Dilihat dari segi ekonomi, tentu saja sistem ini mendatangkan keuntungan. Namun dari segi kesehatan, bila *garbage* tidak direbus terlebih dahulu maka berdampak pada kesehatan babi.
- b. *Incerenation*, ialah melakukan pembakaran secara besar-besaran melalui fasilitas (pabrik) yang khusus dibangun untuk itu. Sistem ini membutuhkan tempat khusus yang luas.
- c. *Sanitary Landfill*, yakni pembuangan sampah dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis, sehingga sampah tidak berada di alam terbuka dan tidak menimbulkan bau tak sedap. Hal ini dapat bermanfaat bila bertujuan untuk meninggikan tanah, tetapi dapat mengurangi tingkat kesuburan tanah apabila sampah yang ditimbun merupakan sampah yang tidak dapat terurai (seperti sampah plastik).
- d. *Composting*, yaitu pengelolaan sampah menjadi pupuk, dengan terbentuknya zat-zat organik yang bermanfaat untuk menyuburkan tanah.
- e. *Discharge to sewers*, sampah dihaluskan terlebih dahulu dan dibuang ke saluran air bekas. Cara ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan sulit untuk dilakukan.
- f. *Dumping*, merupakan cara pembuangan sampah dengan meletakkan begitu saja sampah di tanah.
- g. *Dumping in the water*, pembuangan sampah di air (sungai/laut)
- h. *Landfill*, sampah dibuang di tanah rendah tanpa ditimbun dengan lapisan tanah.

- i. *Individual incineration*, pembakaran sampah yang dilakukan secara perorangan di rumah tangga. Hal ini masih banyak terjadi di wilayah perkampungan.
- j. *Recycling*, yakni pengelolaan sampah dengan maksud pemakaian kembali hal-hal yang masih bisa dipakai. Misalnya kaleng, kaca dan sebagainya, namun hal ini berbahaya bagi kesehatan.
- k. *Reduction*, ialah menghancurkan sampah menjadi jumlah yang lebih kecil dan hasilnya dimanfaatkan.
- l. *Salvaging*, merupakan pemanfaatan beberapa macam sampah yang dipandang dapat dipakai kembali. Jika pemanfaatan ini dilakukan secara langsung, maka dapat berbahaya bagi kesehatan.



BAB V

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TANGERANG SELATAN

5.1 Pokok-Pokok Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan

Dalam melakukan pembangunan, pemerintah diantaranya mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Kebijakan merupakan alat bagi pemerintah untuk mengatur dan menetapkan pendistribusian sumber-sumber daya baik finansial, alam maupun manusia. Ketiga hal tersebut merupakan modal utama bagi pemerintah dalam mengerjakan program-program pembangunan. Salah satu yang menjadi target pemerintah dalam implementasi program pembangunan adalah bagaimana program tersebut dapat mengatasi masalah publik serta dapat mencapai sasarannya.

Tahapan implementasi kebijakan merupakan tahapan yang kompleks dalam pelaksanaannya. Hal ini karena dalam implementasi kebijakan melibatkan berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok di pemerintah. Berbagai pihak yang terkait tersebut merupakan aktor-aktor yang berperan penting dalam mencapai tujuan kebijakan.

Secara umum, keberhasilan implementasi sebuah kebijakan dapat ditentukan oleh dua faktor utama, (Abidin, 2002:189) yaitu :

1. Faktor Internal

a. Kondisi kebijakan yang dilaksanakan, dimana hal tersebut sangat terkait erat dengan:

- Kualitas Kebijakan

Pasca pemekaran dari Kabupaten Tangerang, Pemkot Tangerang Selatan harus mengatasi permasalahan-permasalahan publik sendiri termasuk

permasalahan yang menyangkut pengelolaan sampah. Upaya yang dilakukan Pemkot Tangerang Selatan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan mengeluarkan kebijakan pengelolaan limbah terpadu, khususnya sampah secara mandiri di wilayahnya dalam bentuk peraturan daerah.

”... Ya.. Tangsel ini kan resmi jadi wilayah mandiri sejak desember 2006, otomatis kita punya wewenang dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, banyak permasalahan yang perlu diatasi yang masuk program kerja 100 hari walikota terpilih, diantaranya masalah sampah...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

Kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat. Dalam rangka menangani permasalahan sampah tersebut, Pemkot Tangerang Selatan telah menyusun perangkat kebijakan tentang penanganan dan pengendalian sampah di wilayahnya dalam bentuk peraturan daerah (perda) dengan tujuan untuk mengatasi masalah pencemaran yang ditimbulkan akibat timbunan sampah.

”... kita buat kebijakan pengelolaan sampah mandiri ini kan buat kepentingan semua pihak, kalo sampah numpuk, efeknya kan banyak lalat, udara tercemar. Yaa..walaupun kita masih mengacu pada Perda sampah kabupaten. Jadi gak harus tergantung sama Pemkab Tangerang selaku induk pemerintahan daerah...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

Untuk melaksanakan program-program kebijakan tersebut, pihak Pemkot Tangerang Selatan melibatkan semua pihak yang terkait dengan tata kelola permasalahan sampah. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam hal ini adalah pemerintah daerah (Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman), masyarakat selaku pengguna jasa pelayanan publik, dan pihak swasta dalam hal ini para pengembang.

”... Masalah pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab semua pihak. Pihak yang menjadi pengelola sampah ialah pihak pemerintah, pihak swasta, dan pihak masyarakat yang melakukan swakelola pada sampah mereka...” (RUU Pengelolaan sampah).

Dilihat dari kualitas kebijakan, kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang Selatan sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat

dari adanya dari adanya keterlibatan semua *stakeholder*, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak lain (swasta). Tetapi, masih terdapat kekurangan yaitu kurang dilibatkannya masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah.

Pemerintah kota Tangerang Selatan lebih memfokuskan pengelolaan sampah dengan melakukan kerjasama dengan pihak "atas", seperti pemerintah kabupaten, investor, dan lain-lain. Seharusnya, pemkot lebih mengoptimalkan peran pihak "bawah", dalam hal ini masyarakat. Hal ini penting, karena masyarakat sebagai elemen terbesar di dalam sistem persampahan, dimana masyarakat perlu diberdayakan agar memiliki komitmen di dalam mengelola sampah, seperti proses pemilahan sampah rumah tangga, perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kondisi lingkungan yang sehat dan berkualitas.

- Ketepatan strategi pelaksanaan kebijakan

Suatu kebijakan yang diimplementasikan ke dalam kegiatan atau program-program dikatakan tepat sasaran apabila mampu dilaksanakan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan itu sendiri. Secara teknis, pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak pemkot Tangerang Selatan dijalankan sesuai dengan prosedur kerja yang sudah ditetapkan. Sampah diangkut untuk kemudian dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin milik Pemkab Tangerang, selama proses pembuatan TPA Cipeucang selesai dibangun, sehingga dapat mengurangi volume tumpukan sampah yang selama ini menjadi masalah di wilayah baru tersebut.

"...prosedurnya gini, sampah diambil dari titik-titik tertentu, misalnya dari pasar, untuk selanjutnya diangkut dan dibuang di TPA milik kabupaten di Jatiwaringin. Karena kita belum punya TPA sendiri, TPA di Cipeucang itu masih dalam proses pembangunan..." (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

Khusus kebijakan pengelolaan sampah pasar, pelaksanaannya diserahkan langsung kepada pihak pasar yang ada di wilayah kota Tangerang Selatan.

”...untuk pengelolaan sampah, khususnya sampah pasar, sudah menjadi kebijakan di bawah ya..statusnya memang masih dibawah pihak kabupaten, PD Pasar karena aset pasarnya belum dilimpahkan seluruhnya, tapi secara keseluruhan, pengelolaan sampah di pasar ini sudah menjadi hak dan wewenang kami untuk mengelolanya...” (Odih Supriatna, Kepala Pasar Ciputat, 29 Maret 2011).

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, Pemkot Tangerang Selatan melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak Pemkab Tangerang. Pada awalnya, dibuat kesepakatan di antaranya dengan pemberian bantuan armada pengangkut sampah dan kesediaan pihak Pemkab untuk menampung sampah dari wilayah Tangerang Selatan di TPA Jatiwaringin. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, prosedur pengelolaan sampah tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Tangerang mengembalikan surat permohonan kerja sama Pemerintah Tangerang Selatan terkait layanan sampah di wilayah itu. Hal ini ditandai dengan adanya tindakan penarikan semua armada pengangkut sampah di lingkungan Pemkot Tangerang Selatan dan larangan pembuangan sampah di TPA Jatiwaringin, Mauk.

”...selama ini, sampah di wilayah kita buang di Jatiwaringin. Setelah mekar, Tangsel dilarang buang di situ lagi, alasannya pihak kabupaten mau lebih fokus nanganin masalah sampah di wilayah kabupaten sendiri. Belum lagi, masalah ditariknya armada pengangkut sampah...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

Penghentian kegiatan layanan kebersihan dan pelarangan pembuangan sampah ke TPA Jatiwaringin oleh pemerintah Kabupaten Tangerang bukan tanpa sebab. Kabupaten Tangerang beralasan akan lebih mengintensifkan kerja dalam hal pengelolaan sampah di masyarakat agar dapat dikelola dengan baik. Pemerintah kabupaten akan lebih fokus melayani masalah sampah di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Sejauh ini, Kabupaten Tangerang mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah sampah yang ada di wilayah itu. Luasnya wilayah, minimnya tempat pembuangan sampah sementara dan terbatasnya fasilitas dan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam mengatasi masalah tersebut.

”...dengan segala keterbatasan itulah, Pemerintah Kabupaten Tangerang beralasan 80 persen dari sekitar 6.000 meter kubik sampah

Universitas Indonesia

yang ada di Kabupaten Tangerang tidak terkelola. Hanya 20 persennya yang terkelola, selebihnya masih dibuang di sembarang tempat atau dibakar oleh penduduk...” (DKPP Tangerang, Tempo, 03 Maret 2010).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang beralasan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah berstatus kota baru, sehingga tidak ada lagi kewajiban Pemerintah Kabupaten Tangerang selaku pemerintahan induk di bidang kebersihan Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala DKPP Tangerang:

”...Tangerang Selatan sudah bisa mandiri, karena sudah memiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan sendiri...” (DKPP Tangerang, Tempo, 03 Maret 2010).

Hal tersebut mengakibatkan kota Tangerang Selatan kesulitan untuk menangani masalah sampah wilayah, mengingat status kota Tangerang Selatan sebagai kota baru yang belum memiliki kebijakan pengelolaan limbah/sampah terpadu.

b. Faktor pendukung, diantaranya ialah :

1. Man

Permasalahan sampah menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan. Agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik perlu didukung oleh pegawai yang cukup dan dengan keterampilan yang memadai.

”...kita punya pegawai khususnya pegawai pengangkut sampah, statusnya ada yang PNS, ada juga yang masih honorer...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

Jumlah tenaga kebersihan, khususnya tenaga pengangkut sampah yang dimiliki Pemkot Tangerang Selatan secara keseluruhan, belum mampu mengatasi permasalahan sampah, tetapi dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya di Pasar Jombang, jumlah tenaga kebersihan yang dimiliki sudah cukup mampu untuk mengatasi masalah kebersihan.

”...kalo untuk tenaga kebersihan, saya rasa cukup ya..kita punya tenaga kebersihan yang kami sebut pesapon yang tugasnya yaa membersihkan sampah di pasar, tapi untuk pasar lain saya kurang tahu...” (Saiful, Kepala Pasar Jombang, 30 Maret 2011).

2. Money

Sebagai sebuah kota mandiri pasca pemekaran daerah dari Kabupaten Tangerang, urusan-urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang dan tanggung jawab pihak kabupaten, sebagian dilimpahkan kepada pihak kota Tangerang Selatan agar menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kota Tangerang Selatan.

Konsekuensi dari penyerahan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut, memungkinkan daerah untuk menggali dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaannya. Sumber dana untuk pengelolaan sampah di kota Tangerang Selatan diperoleh dari dana APBD,

”... untuk sumber dana, diperoleh dari APBD. Dana tersebut diperuntukkan untuk biaya operasional pengolahan sampah ... (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

Besarnya anggaran yang disediakan oleh Pemkot Tangerang Selatan belum bisa mencukupi besarnya biaya operasional pengangkutan sampah, seperti yang terjadi di Pasar Ciputat, untuk menutupi biaya operasional pengelolaan sampah, dilakukan kebijakan dengan menarik dana retribusi dari pedagang pasar.

Dasar penarikan retribusi yang dilakukan pihak pengelola pasar kepada para pedagang pasar adalah kebijakan dari pengelola pasar sendiri, mengingat besarnya dana yang disediakan pemkot tidak mencukupi untuk biaya operasional pengelolaan sampah.

”...kami siap menanggung biaya operasional pengangkutan sampah, tentunya kami akan berkoordinasi dulu dengan para pedagang. Karena dana yang digunakan kan berasal dari dana retribusi yang ditarik dari ratusan pedagang... (Odih Supriatna, Kepala Pasar Ciputat, 29 Maret 2011).

Penarikan iuran untuk menutupi kekurangan biaya operasional kebersihan, juga dilakukan, juga dilakukan di Pasar Jombang, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Saiful, Kepala Pasar Jombang:

”...kita adakan iuran kepada pedagang untuk operasional kebersihan. Mereka setuju, karena itu kan buat kepentingan mereka, kembali kepada mereka sendiri... (Saiful, Kepala Pasar Jombang, 30 Maret 2011).

3. *Material*

Dalam hal pengolahan sampah, perlu didukung oleh kesiapan sarana/prasarana penunjang, misalnya tempat pembuangan sampah sementara, tempat pembuangan sampah akhir, armada pengangkut sampah, dan lain-lain. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, volume sampah yang dihasilkan di wilayah kota Tangerang Selatan juga tinggi.

”...untuk volume sampah, itu sudah termasuk sampah rumah tangga dan sampah pasar mencapai 1.600 m³/kubik per hari dalam kurun waktu tahun 2008-2010...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

Volume sampah pasar yang dihasilkan juga tergolong tinggi, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Pasar Ciputat:

”...kalo buat volume sampah di pasar ini, kira-kira mencapai 680 meter kubik/hari...” (Odih Supriatna, Kepala Pasar Ciputat, 29 Maret 2011).

Terkait dengan pengelolaan limbah baik limbah padat (sampah) maupun limbah cair, terdapat 21 tempat pembuangan sementara (TPS). Selain itu juga terdapat 5 unit water treatment plant (WTP) yang tersebar di Serpong, Serpong Utara dan Pondok Aren.

”...sekarang, kita sudah punya 9 truk sampah dengan ciri cat warna hijau, 45 bak sampah, dan 1 mesin pengeruk sampah. Selain itu, kita memiliki TPS yang tersebar di 7 kecamatan, ditambah pembuatan 4 TPS baru ...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 29 Maret 2011).

Dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya, jumlah sarana/prasarana penunjang kebersihan yang dimiliki oleh pemerintah kota Tangerang Selatan belum mampu mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di

wilayah tersebut, mengingat belum selesainya pembangunan Tempat Pembuangan Akhir sampah, selain belum tersedianya tempat pengolahan sampah terpadu.

” ...kalau dilihat dari kapasitas bak sampah yang kita punya, belum cukup buat menampung sampah yang ada di pasar ini, belum lagi ditambah sampah yang dibuang masyarakat, sambil berangkat kerja, mereka buang sampah di bak sampah pasar, kalau ditegur alasannya karena mereka gak punya bak sampah di rumahnya, selain itu masalah pembuangan juga mengalami kendala, kita kan masih nunggu proses pembangunan TPA Cipeucang selesai ... ” (Saiful, Kepala Pasar Jombang, 30 Maret 2011).

4. *Machine*

Pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan bisa berjalan baik jika didukung oleh penggunaan alat-alat modern, seperti:

- Penggunaan alat pengeruk sampah untuk mengumpulkan sampah

”...kalo sampahnya sedikit, biasanya kita pake cara manual dalam pengumpulan sampah, tapi karena ini pasar besar, gak mungkin juga pake cara-cara manual, karena itu, kita pake mesin pengeruk sampah, baru diangkat dengan mobil sampah ... ” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 29 Maret 2011).

- Pengadaan mesin pengolahan kompos

”...kita lagi buat tempat untuk mengolah kompos, itu yang disana kan lagi dibangun bangunan untuk mengolah sampah pasar, untuk dijadikan kompos, karena sebagian besar sampah yang dibuang disitu kan sampah organiknya.. kalo sudah jadi, sampah bisa diolah sehingga mngurangi jumlah volume sampah yang dibuang di TPA ... ” (Saiful, Kepala Pasar Jombang, 30 Maret 2011).

Pengadaan mesin pengolahan kompos diharapkan dapat mampu mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir. Mesin pengolahan kompos tersebut diantaranya berada di Pondok Cabe yang sistem kerjanya dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan pihak swasta, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Pasar Ciputat:

”...setelah sampah dikumpulkan, lalu diangkat untuk kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah (TPA), sebagian sampah dibawa

ke tempat pengolahan buat dijadikan kompos yang lokasinya ada di Pondok Cabe ... ” (Odih Supriatna, Kepala Pasar Ciputat, 29 Maret 2011).

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, penggunaan alat-alat modern tersebut belum mampu mengatasi besarnya volume sampah yang dihasilkan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya tenaga ahli dalam pengoperasian mesin-mesin pengolahan sampah tersebut.

”...kendalanya yaa.. tidak semua bisa menggunakan mesin itu, jadi bisa dibilang kekurangan tenaga ahli, jadi yaa belum bisa maksimal ... ” (Saiful, Kepala Pasar Jombang, 29 Maret 2011).

Ke depan, pemerintah perlu merencanakan pembinaan dan pendidikan pegawai agar *skill* meningkat sehingga pengoperasian mesin dapat berjalan dengan baik.

5. Method

Pengolahan sampah di lingkungan Pemkot Tangerang Selatan mempunyai suatu SOP, di antaranya sampah dari rumah tangga, pasar dikumpulkan, untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan sampah, baik TPS maupun TPA.

” ...prosedurnya gini, bak-bak sampah ditaro di titik-titik tertentu, misalnya di pasar, lalu truk sampahnya, dan ini tidak boleh melebihi dari jam 7 pagi, baru sampah itu dibawa ke TPA, sebagian dibawa ke tempat pengolahan untuk dibuat kompos ... (M.Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

Prosedur kerja pengolahan sampah yang dilakukan pemerintah kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya bisa dijalankan dengan baik, mengingat ketersediaan sarana/prasarana yang belum memadai, seperti belum adanya TPA, belum optimalnya kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos, serta kurangnya jumlah tempat penampungan sampah di lingkungan masyarakat.

”...hambatannya kita belum punya TPA, dan kurangnya tempat sampah/tong sampah di lingkungan tempat tinggal warga...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

Oleh karena itu, perlu adanya upaya komprehensif dalam kegiatan pengelolaan sampah dari semua pihak yang terlibat agar permasalahan sampah dapat segera diatasi dengan baik.

2. Faktor Eksternal

a. Keadaan lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Keadaan lingkungan dan pihak yang menjadi faktor penentu keberhasilan dari pengimplementasian sebuah kebijakan antara lain terdiri dari :

1. Kondisi sosial ekonomi, mencakup beberapa aspek yang ikut membantu dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengolahan sampah, diantaranya:

a. *Tingkat Pendidikan*

Tingkat pendidikan digunakan sebagai salah satu indikator penentu keberhasilan dalam sistem persampahan, yaitu dalam hal perilaku masyarakat untuk melakukan upaya tata kelola sampah mulai dari pembuangan sampah, pengolahan sampah, dan pemanfaatan sampah. Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa penduduk kota Tangerang Selatan didominasi oleh lulusan SLTA, sekitar 29,22 % (RT/RW Kota Tangerang Selatan tahun 2008).

Hal tersebut akan berpengaruh dalam upaya implementasi kebijakan mengenai pengelolaan sampah. Masyarakat dengan tingkat pengetahuan yang rendah, cenderung sulit menerima program kebijakan baru, karenanya perlu dilakukan tindakan nyata yang berkesinambungan, seperti adanya kegiatan sosialisasi untuk mencapai masyarakat sejahtera yang tercermin dari kualitas hidup yang baik. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala DKPP:

”... masyarakat tangsel ini kan kebanyakan tingkat pendidikannya rendah, jadi perlu upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan ...” (M.Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

Dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan sosialisasi termasuk cara mengolah sampah dengan benar, harus dilakukan sampai pada kelompok masyarakat yang terkecil.

”... untuk menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, kami melakukan kegiatan sosialisasi sampai tingkat RT?RW di tiap-tiap kecamatan ...” (M.Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

Agar tercipta kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, selain diadakan kegiatan sosialisasi, juga perlu dilakukan kegiatan lain. Kegiatan nyata yang harus rutin dilakukan dalam bidang kebersihan, misalnya melalui kegiatan kerja bakti, kegiatan penyuluhan kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta pemasangan pamflet yang berisi himbauan kebersihan untuk mengingatkan warga yang dipasang di sekitar tempat tinggal warga masyarakat.

b. *Tingkat Kesehatan*

Tingkat kesehatan digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu program kebijakan terkait masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan. Peran institusi kesehatan sangat diperlukan untuk memberikan kesadaran kepada warga tentang pentingnya menjaga kebersihan dan cara pengelolaan sampah yang benar. Kerjasama dengan institusi kesehatan, contohnya kegiatan yang dilakukan Puskesmas melalui program penyuluhan tentang cara mengolah sampah yang benar, karena jika tidak dilakukan dengan benar, akan berdampak buruk terhadap kesehatan warga sendiri.

”...untuk masalah kesehatan di wilayah kita, saya tidak tahu pasti detilnya tapi tergolong baik ya, rumah sakit tersedia, jumlahnya ada 9 walaupun masih milik swasta, karena kita kan belum punya rumah sakit daerah ...” (M.Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

c. *Tingkat Kesejahteraan Penduduk*

Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang sudah mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya, termasuk pelayanan di bidang kesehatan lingkungan, dalam hal ini pengelolaan limbah/sampah. Melalui pengelolaan sampah terpadu, akan tercipta lingkungan masyarakat yang sehat dan berkualitas.

Universitas Indonesia

”...kalo jalanan bersih, masyarakat juga gak seenaknya buang sampah sembarangan, kan lingkungan juga nyaman, kadang sering kita liat, sambil berangkat kerja, sekalian buang sampah di pojokan pasar situ, memang masih dimaklumi, karena jumlah bak sampah di lingkungan tempat tinggal masyarakat masih sangat kurang, ya perlu perbaikan di sana-sini lah ...” (Saiful, Kepala Pasar Jombang, 30 Maret 2011).

2. Teknologi pengolahan sampah, berperan penting dalam menunjang pelaksanaan atau implementasi suatu program kebijakan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam upaya untuk mengelola sampah yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan, telah dibuat tempat pengolahan sampah dengan teknologi pupuk kompos (*anaerobic composting*).

”...setelah sampah dikumpulkan, lalu diangkut untuk kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah (TPA). Sebagian sampah dibawa ke tempat pengolahan buat dijadikan kompos yang lokasinya ada di Pondok Cabe ...” (Odih Supriatna, Kepala Pasar Ciputat, 29 Maret 2011).

Dalam pelaksanaannya, tempat pengolahan kompos tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, dikarenakan terhambat oleh masalah pendanaan, teknologi, dan kesiapan para pelaksana kebijakan yang masih kurang. Hasil akhir yang dihasilkan (pupuk kompos) juga masih terhambat oleh masalah pemasaran, oleh karena itu, Pemkot Tangerang Selatan melakukan kerjasama dengan pihak swasta.

”...tempat pengolahan kompos yang di Pondok Cabe itu, kita kerjasama dengan pihak swasta, PT Arya apa.. saya juga lupa.. jadi kita udah gak bingung dengan pemasaran komposnya, karena mereka nanti yang bertanggung jawab mengenai pemasarannya...” (M.Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

3. Dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki oleh kelompok masyarakat. Dukungan publik dipandang sebagai salah satu hal yang harus ada dalam upaya pembuatan suatu kebijakan. Jika tidak didukung oleh masyarakat/publik sebagai sasaran program kebijakan, maka kebijakan yang sudah dibuat tidak akan berjalan dengan optimal.

Dalam hal implementasi program-program pembangunan untuk menangani permasalahan kebersihan lingkungan (khususnya yang ditimbulkan oleh sampah) dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanganan sampah,

Universitas Indonesia

diperlukan partisipasi dan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, atau masyarakat.

”...solusi efektif dalam permasalahan pengolahan sampah diantaranya harus ada koordinasi atau kerjasama dengan berbagai pihak, contohnya kerjasama antar wilayah, dan dengan pihak swasta, dalam hal ini adalah para pengembang, dan semua anggota masyarakat, termasuk lurah, kades, RT/RW harus berperan aktif agar sampah terkoordinir secara profesional dan tidak keluar wilayah...” (M.Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

Untuk mewujudkan peran serta masyarakat, dibutuhkan upaya nyata yang dapat membangkitkan motivasi, kemampuan, kesempatan dan menggali serta mengembangkan sumber daya yang dimiliki masyarakat, kegiatan yang telah dilakukan adalah:

- Sosialisasi

Sosialisasi adalah kegiatan mempresentasikan suatu program atau kebijakan baru yang dilakukan oleh pembuat kebijakan terhadap sasaran program/kebijakan tersebut. Dalam hal ini, kegiatan sosialisasi yang dilakukan adalah tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah yang dilakukan Pemkot Tangerang Selatan terhadap masyarakat di wilayah Kota Tangerang Selatan.

”...masyarakat harus berperan aktif agar sampah rumah tangga terkoordinir secara profesional agar sampah tidak keluar wilayah. Lurah, Kades, RT?RW juga harus rutin melakukan kegiatan sosialisasi kebersihan lingkungan yang nyata, seperti kerja bakti...” (M.Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

Dengan adanya kegiatan sosialisasi, program-program kebijakan pengelolaan sampah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat dipahami dengan benar oleh masyarakat, sehingga dapat dijalankan dengan baik.

- Dana

Selain kegiatan sosialisasi, peran serta masyarakat berupa pendanaan juga sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan operasional pengelolaan

sampah, mengingat dana untuk kegiatan tersebut masih sangat minim. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kepala DKPP:

”...sumber dana diperoleh dari APBD, anggaran untuk pengendalian sampah sebesar 6 miliar pada tahun 2010 dan 14 miliar pada tahun 2011...” (M.Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

Upaya penanganan sampah yang dilakukan pihak Pemerintah Kota Tangerang Selatan dilakukan secara bertahap karena dana APBD yang terbatas. Hal tersebut diakibatkan dana tersebut harus dibagi dengan pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, transportasi, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Untuk mengatasi permasalahan dana tersebut, dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, seperti yang ada di Pasar Jombang, di mana para pedagang ditarik iuran rutin untuk kegiatan kebersihan pasar.

”...karena dana pengolahan sampah ini masih sangat minim, kita buat kebijakan yaitu kita adakan iuran kepada pedagang pasar untuk kegiatan operasional kebersihan pasar, dan mereka mendukung, karena itu kan buat kepentingan mereka juga...” (Saiful, Kepala Pasar Jombang, 30 Maret 2011).

Kegiatan tersebut mendapatkan dukungan dari para pedagang yang ada di pasar Jombang,

”...pada dasarnya saya sih tidak keberatan ya dengan iuran kebersihan pasar, asalkan penggunaannya jelas. Karena itu kan buat kepentingan pedagang juga yaa biar pasar tetap bersih...” (Sumiati, pedagang pasar Jombang, 30 Maret 2011).

Akan tetapi, kegiatan pendanaan berupa penarikan iuran tersebut perlu dilakukan adanya pengawasan yang menyeluruh, karena jika tidak, rawan menimbulkan adanya penyimpangan dari kegiatan pendanaan tersebut. Upaya pengawasan yang dapat dilakukan adalah dengan adanya laporan kegiatan, bentuk pernyataan penarikan dana, dasar hukum yang jelas, dan lain-lain.

”...kalo laporan iuran pedagang kita buat, kan ada bukti kertas retribusinya...” (Saiful, Kepala Pasar Jombang, 30 Maret 2011).

- Pemilahan Jenis Sampah

Dengan dilakukannya pemilahan terhadap jenis-jenis sampah, maka akan memudahkan dalam pengelolaan sampah selanjutnya. Sampah yang diangkut oleh dinas biasanya merupakan jenis sampah basah.

”...kalo sampah yang diangkut mobil dinas biasanya jenis sampah basah,yaa sampah pasar, contohnya sayuran, kalo untuk sampah kering atau sampah plastik, sudah diambil sama pemulung, jadi gak perlu lagi memilah-milah sampahnya...” (Odih Supriatna Kepala Pasar Ciputat, 29 Maret 2011).

Kegiatan pemilahan jenis sampah tersebut harus digerakkan mulai dari tingkat RW, selain kegiatan untuk membangun tempat pengumpulan, pengangkutan, dan penimbunan sampah di wilayahnya masing-masing.

- Kegiatan Kerjasama

1. Kerjasama dengan Pihak Swasta

Peran swasta sebagai salah satu unsur dari masyarakat berperan serta dalam berbagai kegiatan pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan sampah, pengangkutan sampai tempat pembuangan akhir, baik berupa penyediaan dana investasi, pembangunan sarana dan prasarana maupun pengoperasian sistem pengelolaan yang ada.

Pihak swasta yang diajak kerjasama adalah perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan, seperti perusahaan makanan, perusahaan pengembang, dan perusahaan pengolahan kompos. Dengan adanya kegiatan kerjasama tersebut, dapat diperoleh manfaat, misalnya bantuan dana, penyediaan sarana/prasarana, dan tenaga ahli dalam pengoperasian mesin-mesin pengolahan sampah. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kepala DKPP:

”...pemkot memiliki tempat pengolahan kompos di Pondok Cabe yang bekerjasama dengan pihak swasta, selain itu kita juga sedang melakukan pendekatan kepada 3 kawasan terpadu yaitu BSD, Alam Sutra dan Bintaro Jaya untuk melakukan kerjasama pengelolaan sampah...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

Kerjasama pengelolaan sampah tersebut juga dilaksanakan oleh pihak pasar yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan,

”...Kita juga adakan kerjasama dengan PT Indofood, karena mereka juga ikut menyumbang sampah plastik yang tidak sedikit, kira-kira 30.000 bungkus/hari...” (Saiful, Kepala Pasar Jombang, 30 Maret 2011).

Kerjasama yang dilakukan bukan tanpa kendala. Hambatan/kendala yang dihadapi adalah belum jelasnya kontrak kerjasama yang dilakukan pihak Kota Tangerang Selatan dengan pihak swasta tersebut, sehingga pelaksanaannya belum maksimal, selain kurang tertariknya pihak pengembang, khususnya di kawasan terpadu untuk melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak Pemkot Tangerang Selatan.

”...pemkot adakan kerjasama dengan swasta, walaupun kontrak kerjasamanya belum jelas ya...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

2. Kerjasama dengan Puspitek

Merupakan bentuk kerjasama dengan cara membuang sampah di kawasan milik Kementerian Riset dan Teknologi berupa penyediaan lahan untuk menampung sampah untuk sementara.

”...selain itu ada juga kerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Puspitek) berupa penyediaan lahan untuk menampung sampah sementara...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

3. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang

Langkah-langkah kebijakan yang lain tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah dengan melakukan peninjauan kerjasama pembuangan sampah dengan Kabupaten Tangerang. Hal ini sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Antar Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Bab 8 yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Pengelolaan Sampah, yang menyebutkan Pemerintah Kabupaten atau Kota dapat bekerjasama dengan

Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam mengelola sampah di Banten atas sepengetahuan gubernur.

”...sekarang ini, ibu walikota sedang mengajukan lobi kerjasama dengan Pemkab Tangerang mengenai masalah tempat pembuangan sampah akhir, tetapi MoUnya baru dibuat tahun 2012...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

4. Kerjasama dengan Investor

Dalam hal pengelolaan sampah, pemerintah Kota Tangerang Selatan merancang sebuah agenda/rencana pengolahan sampah menggunakan teknologi modern dengan menggandeng investor dari Singapura. Berdasarkan hasil presentasi dari perusahaan Singapura, menunjukkan bahwa sampah di Tangerang Selatan mencapai 400 ton per hari dan bisa diolah menjadi energi listrik sebesar 22 megawatt. Energi listrik yang dihasilkan dari pengolahan sampah ini akan dijual ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang saat ini masih dalam tahap negosiasi.

Pengolahan sampah juga dijanjikan hanya dengan 400 ton sampah mampu menghasilkan listrik hingga 22 megawatt, akan tetapi, hal tersebut masih diragukan, karena untuk menghasilkan listrik 2 megawatt, pengolahan sampah tercanggih di Jerman membutuhkan sampah organik sebanyak 120 ton, yang rata-rata diperoleh dari 300 hingga 400 ton sampah umum.

Dalam pelaksanaannya, pengolahan sampah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selama ini, Tangerang Selatan mengklaim pengolahan sampah yang dilakukan tanpa *tipping fee* atau retribusi. Menurut beberapa pengamat sampah perkotaan, belum ada di dunia, sampah perkotaan yang dikelola tanpa *tipping fee* atau retribusi dapat berhasil. Banyak rencana kesepakatan dan kerjasama pengolahan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan investor selalu tanpa biaya, sehingga hanya menjadi kesepakatan tanpa eksekusi.

”...kalo kerjasama dengan investor dari Singapura itu baru sekedar wacana, belum ada realisasinya...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

4. Kemampuan para pejabat pelaksana kegiatan, berperan untuk mendukung keberhasilan suatu program kebijakan. Untuk dapat menjalankan kebijakan dengan baik, kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan memerlukan dasar hukum yang jelas. Dasar hukum dalam pengelolaan sampah di wilayah Pemkot Tangerang Selatan adalah Peraturan Daerah tentang Sampah.

”...untuk pengolahan sampah, kita masih mengacu pada perda sampah pemkab Tangerang, karena perda kita belum selesai disusun. Kemungkinan besar isi perdanya hampir sama, hanya ada penyesuaian nantinya...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

Aparat pembuat kebijakan harus memiliki kemampuan/*skill* dalam menganalisis dan mengambil keputusan yang tepat dari suatu kebijakan, agar implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal pembuatan kebijakan. Untuk itu, Pemkot Tangerang Selatan melakukan upaya-upaya pelatihan terhadap pegawainya untuk lebih meningkatkan keterampilan yang dimiliki, agar kualitas pelayanan publik yang diberikan juga semakin baik.

”...kalo untuk pelatihan pegawai, kita ada ya, seperti misalnya ikut seminar kesehatan, dan untuk supir misalnya kita pake supir yang memang sudah berpengalaman, walaupun statusnya masih pegawai honorer...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

5.2 Kendala / Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan

Dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan, tidak terlepas dari adanya resiko kegagalan akibat adanya kendala/hambatan yang dihadapi. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pemkot Tangerang Selatan, kendala yang dihadapi adalah:

- a. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah

Kendala pertama yang dihadapi oleh Kota Tangerang Selatan dalam hal pengelolaan sampah adalah belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai di lingkungan tempat tinggal warga,

”...kendala yang kita hadapi adalah kurangnya tempat pembuangan sampah/tong sampah yang cukup di lingkungan tempat tinggal warga, akibatnya warga memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk tempat pembuangan sampah, dan yang lebih buruk mereka buang sampah di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

Perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan akibat tidak adanya tong sampah juga dikeluhkan oleh Kepala Pasar Jombang,

”...sampah numpuk di pasar, tapi bukan saja bersumber dari sampah pasar, tapi juga dari masyarakat sekitar, alasannya karena tidak ada bak penampungan sampah di rumah mereka...” (Saiful, Kepala Pasar Jombang, 30 Maret 2011).

Kendala yang paling utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan ini adalah belum tersedianya Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Cipeucang yang masih dalam proses pembangunan. Rencananya, akan ada empat tahap pembangunan TPA ini dengan perkiraan biaya sekitar 5 miliar yang sepenuhnya dibiayai oleh Kementerian Pembangunan Umum.

”...kendala yang dihadapi adalah kita belum punya TPA sendiri, yang proses pembangunannya belum selesai...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28Maret 2011).

b. Warga setempat belum terpadu untuk menanggulangi sampah rumah tangga

Kesadaran warga masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Tangerang Selatan masih tergolong rendah. Hal tersebut ditandai dengan adanya perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan aspek kebersihan lingkungan, seperti misalnya membuang sampah di pinggir-pinggir jalan, di sungai, dan lain-lain.

”...perilaku masyarakat sendiri kurang mendukung yaa seperti masih ada warga yang membuang sampah sembarangan, akibatnya sampah menumpuk di pinggir-pinggir jalan dan pasar, trus buang sampah di kali, warga belum terpadu untuk menanggulangi sampah rumah tangga...” (Saiful, Kepala Pasar Jombang, 30 Maret 2011).

Masalah kurangnya kesadaran/partisipasi dari masyarakat dalam hal kebersihan, juga diungkapkan oleh Kepala DKPP,

”...kalo untuk partisipasi masyarakat masih kurang yaa, apalagi warga perumahan, mereka cenderung cuek dengan masalah kebersihan khususnya sampah, karena mereka pikir kan sudah ada petugas yang mengurusinya...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

c. Pendanaan yang belum cukup

Penanganan dan pengendalian akan menjadi semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleksnya jenis maupun komposisi dari jenis sampah seiring dengan semakin maju dan berkembangnya kebudayaan, sehingga pada umumnya penanganan sampah di perkotaan relatif lebih sulit dibanding sampah di pedesaan.

Masalah yang sering muncul pada penanganan sampah kota adalah masalah biaya operasional yang tinggi dan semakin sulitnya ruang yang tersedia sebagai tempat pembuangan sampah. Selain itu, masalah pendanaan juga menjadi masalah yang dapat menghambat proses implementasi suatu kebijakan publik, seperti yang terjadi di Kota Tangerang Selatan pasca pemekaran daerah. Upaya penanganan sampah yang dilakukan pihak Pemerintah Kota Tangerang Selatan dilakukan secara bertahap karena dana APBD yang terbatas. Hal tersebut diakibatkan dana tersebut harus dibagi dengan pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, transportasi, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

”...kalo kendala sudah pasti ada yaa, diantaranya dana yang minim, jadi kita kekurangan dana buat kegiatan operasional pengelolaan sampah...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

5.3 Solusi Penanganan Masalah Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan

Solusi penanganan sampah tidak dapat ditunda-tunda, hal tersebut bukan hanya sebatas masalah kesehatan dan lingkungan, tetapi juga potensial menghambat laju perekonomian Tangerang Selatan yang mengalami perkembangan pesat dari 7,6% naik mencapai 8,5% atau lebih tinggi dari tingkat

nasional yang hanya mencapai 6,4%. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kepala DKPP:

”...dengan penataan pengolahan sampah yang baik akan menambah potensi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi sampah...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

Untuk itu, pihak Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Penambahan armada pengangkut sampah

Untuk memaksimalkan kegiatan pengangkutan sampah ke tempat pembuangan sampah, pihak Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan menambah jumlah armada pengangkut sampah secara bertahap, mulai dari 3 truk pada tahun 2010, 4 truk pada tahun 2011, 20 truk pada tahun 2012, dan 20 truk pada tahun 2013.

”...diharapkan masalah sampah bisa teratasi pada tahun 2012 dengan ketersediaan armada sebanyak 20 unit...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

2. Pembangunan TPA/TPST Cipeucang

TPA Cipeucang yang berlokasi di Kecamatan Setu mempunyai luas 2,5 hektar yang akan beroperasi dengan sistem *sanitary landfill*. Diharapkan, dengan terselesaikannya pembangunan TPA ini akan menyelesaikan masalah sampah di Kota Tangerang Selatan.

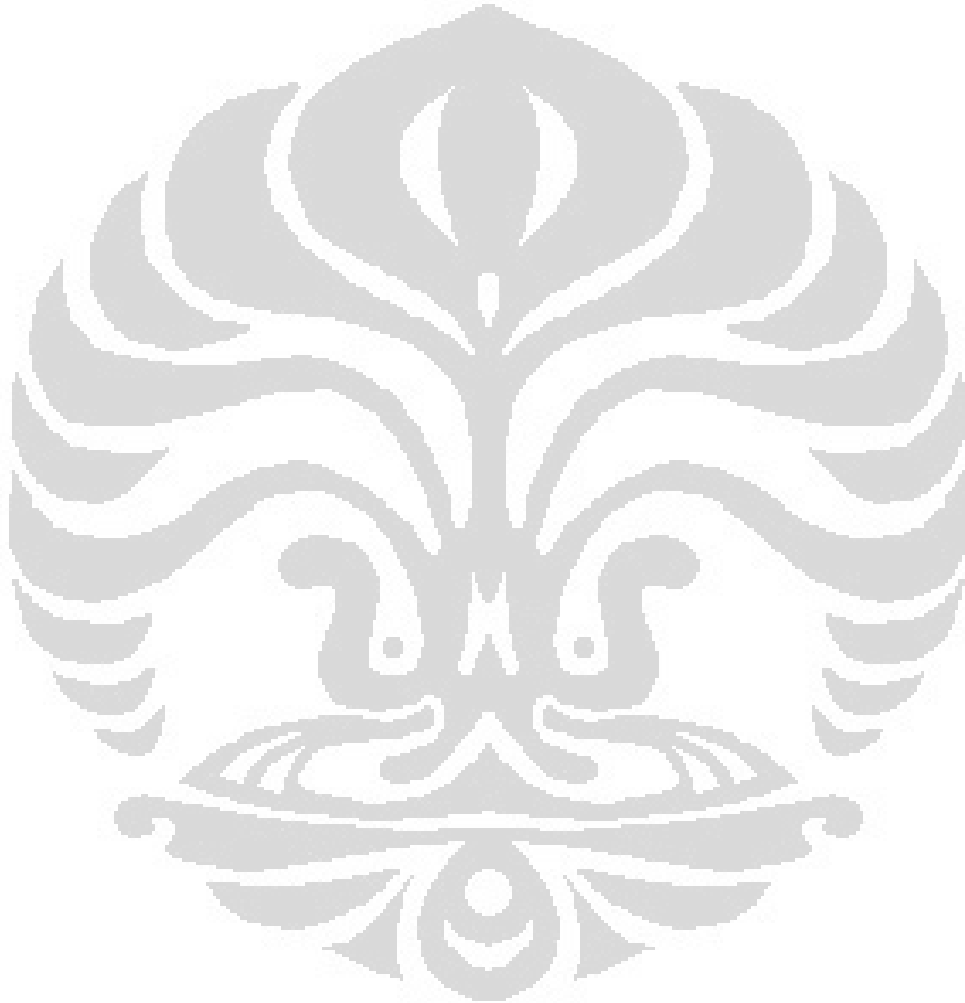
”...tahun 2013 ditargetkan tidak ada lagi sampah yang menumpuk dan berserakan di Tangsel karena TPA Cipeucang sudah bisa beroperasi pada tahun 2012...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

3. Perluasan secara bertahap lahan TPA Cipeucang

Untuk dapat menampung volume sampah yang dihasilkan di wilayah Kota Tangerang Selatan, maka pihak Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melakukan perluasan secara bertahap TPA Cipeucang, dari 5,4 hektar menjadi 14 hektar.

”...upaya perluasan lahan TPA juga masih kita usahakan secara bertahap...” (M. Nur Slamet, Kepala DKPP, 28 Maret 2011).

Melalui upaya-upaya solusi permasalahan tersebut, diharapkan permasalahan sampah yang terjadi di Kota Tangerang Selatan dapat segera diatasi.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yang membahas mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan, dapat ditarik simpulan yaitu: awal persoalan masalah sampah yang timbul di Kota Tangerang Selatan dimulai dari adanya sikap Pemerintah Kabupaten Tangerang yang secara mendadak dan sepihak memutuskan kerjasama pengolahan sampah pada Desember 2009 di saat pemerintahan definitif Tangerang Selatan belum terbentuk. Selain itu, Pemerintah Kabupaten juga melakukan pelarangan kegiatan pembuangan sampah di TPA milik kabupaten di Jatiwaringin, Mauk. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya tumpukan sampah yang menggunung di sejumlah titik karena tidak terangkut oleh mobil pengangkut sampah. Sampah menumpuk di 25 TPS yang sebagian besar adalah TPS Liar. Volume sampah yang dihasilkan wilayah ini sekitar 3.200-1500 meter kubik/hari yang dihasilkan dari 1,3 juta jiwa yang tinggal di 49 kelurahan dan 5 desa di 7 kecamatan. Dari asumsi itu, diperkirakan sampah yang dihasilkan sekitar 2,5-3 liter per orang per hari. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan beberapa langkah penanganan, diantaranya dengan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah, penambahan armada truk pengangkut sampah, pembangunan TPA di Cipeucang, dan dibuatnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.

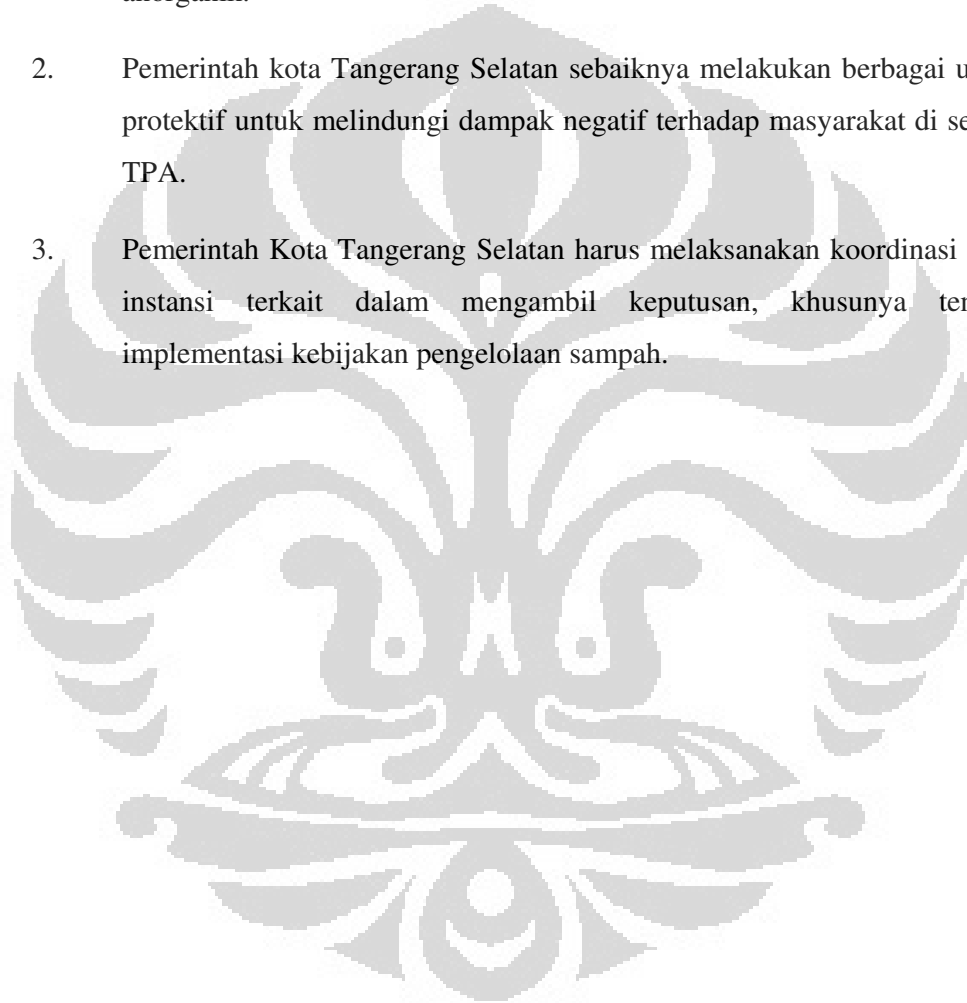
6.2 Saran

Dari simpulan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi kebijakan pengelolaansampah di Kota Tangerang Selatan, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan pengelolaan persampahan dan melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan persampahan kepada seluruh stakeholder,

khususnya masyarakat secara kontinu. Hal ini penting untuk mendorong masyarakat sebagai elemen terbesar di dalam sistem persampahan agar melakukan prinsip-prinsip 3R yang proses awalnya adalah pemilahan sampah dalam penempatan sampah. Masyarakat perlu diberdayakan agar memiliki komitmen di dalam mengelola sampah. Sampah-sampah yang masuk ke TPA sebaiknya sudah dipisahkan menjadi sampah organik dan anorganik.

2. Pemerintah kota Tangerang Selatan sebaiknya melakukan berbagai upaya protektif untuk melindungi dampak negatif terhadap masyarakat di sekitar TPA.
3. Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus melaksanakan koordinasi antar instansi terkait dalam mengambil keputusan, khususnya tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah.



DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Abidin, Said Zainal. (2002). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Azwar, Azrul. (1979). *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Brundtland, G.H. (1987). *Our Common Future: The World Commission on Environment and Development*. New York: Oxford University Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Goldsmith, Edward. (1984). *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hosio, Drs. J.E. (2007). *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Yogyakarta: Laksbang.
- Hidayat, Herman.(2002). *Politik Lingkungan : Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irawan, Prasetya. (2004). *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemua*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Komisi WHO mengenai Kesehatan Lingkungan. (2001). *Planet Kita Kesehatan Kita*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kusnoputranto, H. (1983). *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- Malo, Manase dan Trisnoningtias, Sri. (tanpa tahun). *Metode Penelitian Masyarakat*. Pusat Antar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Malarangeng, Andi. A dkk. (2001). *Otonomi Daerah: Perspektif Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika (BIGRAF) Publishing.
- Maskun, Sumitro. (2002). *Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Tim Suara Pembaruan, Pustaka Sinar Harapan.
- Moenir, H.A.S. (2002). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustopadidjaya, Bintoro Tjokroamidjojo. (1988). *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Penerapan*. Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial)

Universitas Indonesia

- Bintoro Tjokroamidjojo. (1981). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial)
- Notoadmodjo, Soekidjo. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Prihandarini, Ririen. (2004). *Manajemen Sampah: Daur Ulang Sampah Menjadi Pupuk Organik*. Jakarta: Perpod.
- Prasetyo, Bambang dan Jannah, Lina Miftahul. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Prasojo, Eko, Maksun, Irfan Ridwan dan Kurniawan, Teguh. (2006). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Rondinelli, Denis, Nelis dan Cheema. (1993). *Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience*. Washington DC: The World Bank
- Sastrawijaya, A.T. (2000). *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sarudji, Didik. (1983). *Pengelolaan Sampah*. Surabaya: Akademi Penilik Kesehatan Teknologi Sanitasi.
- Silalahi, TB. (2002). *Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Tim Suara Pembaruan, Pustaka Sinar Harapan.
- Smith, B. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimension of the State Asia*.
- Soemarwoto, Otto. (2001). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Subarsono, AG. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suisyanto. (2007). *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam, Perspektif Normatif Filosofis dan Praktis*. Yogyakarta: PT LKIS.
- Suprihatin, Agung. (1997). *Buku Panduan Pengelolaan Sampah*. Malang: PPPGT/VEDC Malang dan Swisscontact.
- The World Bank. (2000). *Integrated Planning for Sustainable Environment*. London: Earthscan Publication
- Tim Suara Pembaruan. (2002). *Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Thoha, Miftah. (2005). *Dimensi-Dimesi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Umar, Husein. (2003). *Metode Riset Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Urban and Regional Development Institute (URDI) dan Yayasan Sugiyanto Soegijoko. (2005). *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21, Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Wahab, Abdul Solichin. (2004). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Winarno, Budi. (2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

KARYA ILMIAH

Araroi, Lavi Masruri. (2004). *Evaluasi Kebijakan Swastanisasi Pengelolaan Sampah di Kota Depok*. Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia. Skripsi. Tidak diterbitkan.

Rachmawaty, Randy. (2006). *Implementasi Kebijakan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1988 Mengenai Pengelolaan Sampah Padat di DKI Jakarta*. Skripsi. Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan.

Wulandari, Peny. (2009). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah terpadu Kota Depok*. Skripsi. Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan.

PERATURAN

Republik Indonesia, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 2003 Tentang Pembangunan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang *Pengelolaan Sampah*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Pembagian Wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Otonomi Daerah*.

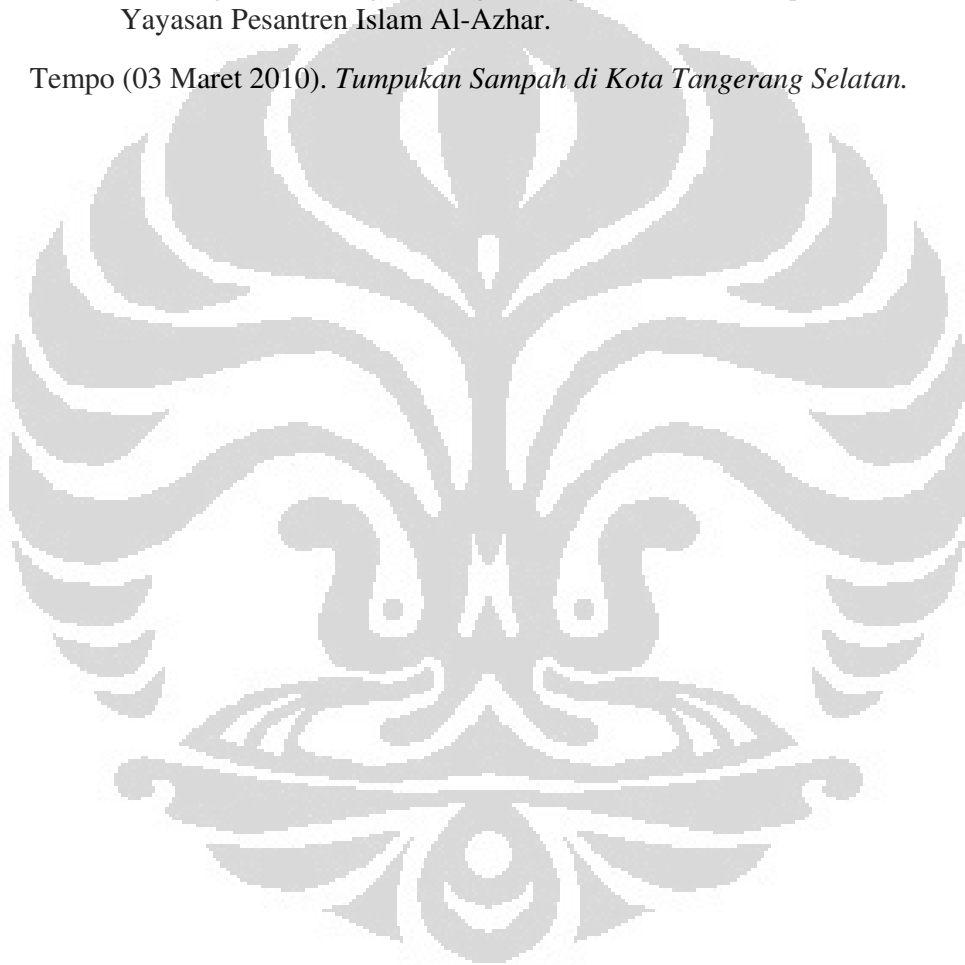
LAINNYA

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. (2001). *Pusat Informasi Lingkungan Hidup (State of The Environment Report Indonesia 2001)*.

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang. (2010). *Pengelolaan Sampah*.

Japan International Cooperation Agency. (2003). *Draft Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Persampahan*. Jakarta : Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar.

Tempo (03 Maret 2010). *Tumpukan Sampah di Kota Tangerang Selatan*.



Daftar Riwayat Hidup

Nama : Erna Budiarti

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Juli 1988

Alamat : Asrama DKI No. 2 Rt 002/003, Semper
Jakarta Utara

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Sawangan I Gombong Tahun 1990 - 1996

SMP : SMP Negeri II Gombong Tahun 1996 - 1999

SMA : SMA Negeri I Gombong Tahun 1999 - 2002

Diploma 3 : Jurusan Perumahsakitan , Fakultas Kedokteran,
Universitas Indonesia Tahun 2002 – 2005

Riwayat Pekerjaan : Guru SDN Pasar Baru 01 Pagi Tahun 2005 - sekarang

Lampiran 1

- Kondisi sampah di Pasar Jombang



- Truk pengangkut dan bak sampah milik Pemkot Tangerang Selatan



- Mesin mengolah sampah



- Kondisi sampah di pasar Ciputat



- Peta Kota Tangerang Selatan



Lampiran 2.

Hasil Wawancara I

Nama Narasumber : Bapak Muhammad Nur Slamet
Jabatan : Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan
Tempat : Kantor Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan
Waktu : Hari Senin, 28 Maret 2011

1. Sebagai sebuah kota mandiri pasca pemekaran daerah, bagaimana kewenangan yang dimiliki kota Tangerang selatan khususnya dalam hal pengelolaan sampah ?

Jawab :

Ya... Tangsel ini kan resmi jadi wilayah mandiri sejak desember 2006, otomatis kita punya wewenang dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri. Yaa.. ibaratnya bayi baru lahir, kita juga masih... istilahnya... belajar jalan, makan.... sama juga di pemerintahan Tangsel, masih banyak yang perlu dibenahi. Banyak permasalahan yang perlu segera diatasi yang masuk program kerja 100 hari walikota terpilih, diantaranya masalah sampah, infrastruktur, banjir, pengelolaan air bersih, kemacetan, kesehatan dan pendidikan.

2. Bagaimana kebijakan pengelolaan sampah itu dilakukan ?

Jawab :

Iya.. mengenai permasalahan sampah memang menjadi sorotan, karena memang kompleks sekali ya.. Kendala yang ada dikarenakan kita belum punya TPA sendiri. Selama ini, sampah di wilayah kita buang di Jatiwaringin. Setelah mekar, Tangsel dilarang buang di situ lagi, alasannya pihak kabupaten mau lebih fokus nanganin masalah sampah di wilayah kabupaten sendiri. Belum lagi, masalah ditariknya armada pengangkut sampah, sama supir-supirnya lagi,ha...ha.... Selain itu juga, kurangnya partisipasi masyarakat dan dana atau anggaran yang terbatas.

3. Menurut Anda, bagaimana kondisi sampah yang terjadi saat ini di Kota Tangerang Selatan ?

Jawab :

Ya.. jadi begini.. sampah itu sendiri kan ada 2 jenis, pertama sampah pelayanan, dari rumah tangga, trus yang numpuk di pinggir-pinggir jalan, dan sampah pasar. Orang selalu melihat, oohh... sampah di tangsel menumpuk di jalan, pasar. Yang tadinya bersih, sekarang kotor. Sementara mereka kan kurang ngerti kondisi sebenarnya. Masalah sampah ini kan mencakup banyak aspek, mulai dari kesiapan sarana prasarana penunjang, kondisi masyarakat, ya.. masyarakat di tangsel ini kan rata-rata tingkat pendidikannya rendah, orang kampung lah.. jadi tingkat kesadarannya, khususnya kebersihan lingkungan masih rendah, jadi perlu upaya untuk menumbuhkan kesadaran kebersihan lingkungan. Sekarang, kita sudah punya 9 truk sampah dengan ciri cat warna hijau, kalo punya kabupaten kuning, DKI oren ya.. trus ada 45 bak sampah dan 1 mesin pengeruk sampah. Pelan-pelan sudah mulai tertata lah.

4. Hal apa saja yang sudah dilimpahkan oleh Pemkab Tangerang kepada Pemkot Tangerang Selatan ?

Jawab :

Untuk urusan pemerintahan, pemkot tangsel sudah mempunyai wewenang untuk mengatur sendiri. Kita kan juga sudah memiliki walikota terpilih yang resmi dilantik kemarin. Tapi.. untuk aset-aset tertentu, seperti misalnya aset pasar belum semuanya dilimpahkan oleh pemkab tangerang. Sedangkan masalah kotoran atau sampahnya udah gak mau ngurus, mau tidak mau.. kita juga yang harus nanganin.

5. Berdasarkan pada peraturan/undang-undang apa kebijakan pengelolaan sampah ini dilakukan ?

Jawab :

Untuk pengolahan sampah, kita masih mengacu pada perda sampah pemkab tangerang. Karena, perda kita belum selesai digodok. Memang kita sudah memiliki anggota DPRD, tetapi yaa.. pembuatan perda khususnya mengenai sampah belum rampung akibat terhambat oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Ya biasalah politik.. kemungkinan sih isi perdanya hampir sama dengan perda sampah pemkab tangerang, hanya mungkin ada sedikit penyesuaian lah, karena kondisi daerahnya kan juga lain.

6. Bagaimana mekanisme/prosedur kerja kebersihan yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang Selatan, khususnya Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) ?

Jawab :

Jadi... untuk pengangkutan sampah, seperti dari rumah tangga, sampah pasar, hanya dibatasi selama 1 jam, mulai dari jam 5-6 pagi, biar gak mengganggu ya.. Setelah itu, kita cukup narok bak sampah atau yang disebut amrol di titik-titik tertentu, untuk selanjutnya diangkut besok. Karena kita tidak boleh buang di TPA milik kabupaten di Jatiwaringin, kita adakan kerjasama dengan

pemprov DKI, selain itu ada juga kerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Puspitek) berupa penyediaan lahan untuk menampung sampah sementara. Kalo kerjasama dengan investor Singapura, itu baru sebatas wacana saja, belum ada realisasinya. Sekarang ini, ibu walikota juga sudah mengajukan lobi kerjasama dengan pemkab tangerang, sudah ada Mou-nya, sambil menunggu pembuatan TPA Cipeucang selesai.. yaa.. sekitar bulan oktober, sehabis lebaran lah.

7. Apakah ada hambatan dalam proses pembuatan TPA di Cipeucang tersebut ?
Apa saja ?

Jawab :

Iya... tentu saja ada. Diantaranya protes dari masyarakat sekitar TPA. Bilangnya bau, kotor, macem-macem lah.. Tapi dengan sosialisasi yang kita lakukan, sedikit demi sedikit masyarakat mulai ngerti. Yaa.. itu kan untuk kepentingan mereka sendiri juga.

8. Darimana sumber dana untuk pengelolaan sampah diperoleh ?

Jawab :

Untuk sumber dana, diperoleh dari dana APBD. Dana tersebut diperuntukkan untuk biaya operasional, membayar supir armada sampah, dan lain-lain. Supir sendiri kan ada yang berstatus PNS, ada juga yang masih honor, disebutnya tenaga sukarela.. Nah, tenaga sukarela ini yang diambil dari dana APB.

9. Bagaimana hubungan/keterkaitan antara permasalahan sampah dengan kualitas hidup masyarakat di Tangerang Selatan ?

Jawab :

Pasti ada hubungannya ya.. baik itu secara langsung maupun tidak. Seperti misalnya kalo sampah numpuk, efeknya kan banyak lalat, udara tercemar. Tapi kalo masalah banjir tidak ada kaitannya ya, kalo untuk kualitas lingkungan, iya.. Khusus masalah banjir yang sering terjadi di wilayah tangsel, dikarenakan adanya pengecilan sungai.. itu sungai Ciputat contohnya, dulunya kan lebar, sekarang lama-lama makin kecil. Selain itu, pembangunan kompleks-komplek perumahan yang tidak berwawasan lingkungan. Karena pada dasarnya wilayah tangsel ini kan tinggi, tapi banjir udah kaya jadi agenda tahunan, ha.. ha..

10. Apakah sarana/prasarana yang dimiliki Pemkot Tangerang Selatan sudah bisa untuk mengatasi permasalahan sampah ?

Jawab :

Untuk volume sampah, itu udah termasuk sampah rumah tangga dan sampah pasar, mencapai 1600 m/kubik per hari, angka itu berdasarkan perhitungan dalam kurun waktu antara tahun 2008-2010 ya.. Kita memiliki TPS yang tersebar di 7 kecamatan, ditambah pembuatan 4 TPS baru. Selain itu, pemkot

memiliki tempat pengolahan sampah dengan teknologi pupuk kompos (*anaerobic composting*) di Pondok Cabe kerjasama dengan pihak swasta. Kalo masalah sudah bisa diatasi atau belum, itu relatif ya.. Sekarang kita bisa bilang masalah sampah aman, tetapi pihak lain kan punya cara pandang yang berbeda. Seperti kemarin, kita baru dapet sorotan dari media, yang mengatakan pemkot tangsel masih belum berhasil menangani masalah sampah. Ini kan tentu saja jadi agenda pemkot, khususnya DKPP yang harus segera diselesaikan.

11. Kendala apa yang dihadapi Pemkot Tangerang Selatan dalam masalah pengolahan sampah ?

Jawab :

Kalo bicara kendala, sebenarnya banyak faktor ya.. Diantaranya kesadaran warga yang masih kurang, warga buang sampah sembarangan, akibatnya sampah menumpuk di pinggir-pinggir jalan dan pasar. Hal ini karena kurangnya tempat pembuangan sampah/tong sampah yang cukup di lingkungan tempat tinggalnya, selain karena tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Misalnya ya.. orang bangun kontrakan, tapi gak bangun tempat sampahnya, jadi mau tidak mau, warga buang sampahnya sekenanya.

12. Menurut Anda, apa solusi terbaik yang efektif dilihat dari kondisi masyarakat dan daerah Tangerang Selatan ini untuk mengatasi masalah pengolahan sampah ?

Jawab :

Solusinya... hmmm... pertama, dibangunnya tempat pembuangan sampah yang memadai, seperti TPA Cipeucang dan TPS-TPS di tiap-tiap kelurahan. Kedua, harus ada partisipasi aktif dari masyarakat. Lurah, Kades, RT/RW harus rutin melakukan kegiatan sosialisasi kebersihan lingkungan yang nyata, misalnya dengan kegiatan kerja bakti. Untuk kegiatan itu, masyarakat yang di perkampungan yang bisa aktif. Kalo warga perumahan cenderung cuek ya.. mungkin alasannya sibuk, dan karna komplek-komplek itu kan sudah punya standar kebersihan lingkungan ya, kan bisa dilihat lingkungannya lebih tertata. Terus yang ketiga, harus ada koordinasi/kerjasama dengan berbagai pihak, contohnya kerjasama antar wilayah, kerjasama dengan pihak swasta, contohnya antara DKPP dengan produsen makanan/minuman berupa pendanaan. Disini, kerjasama kita dengan PT Indofood, karena mereka juga turut menyumbang sampah plastik, kira-kira 30.000 bungkus/hari. Jadi diharapkan, kedepannya permasalahan sampah ini bisa dikelola dengan baik, meskipun butuh upaya yang tidak mudah ya...

Hasil Wawancara II

Nama Narasumber : Bapak Odih Supriatna
Jabatan : Kepala Pasar Ciputat Kota Tangerang Selatan
Tempat : Pasar Ciputat Kota Tangerang Selatan
Waktu : Hari Selasa, 29 Maret 2011

1. Bagaimana menurut Anda kondisi kebersihan di lingkungan pasar ini ?

Jawab :

Yah.. bisa dilihat ya.. Ini kan pasar besar, udah gitu posisinya disamping jalan raya, jadi ya semrawut. Pasar ini masuk dalam kecamatan Ciputat. Kalo kondisi kebersihan.. ya... namanya juga pasar tradisional ya.. Memang kita sudah punya tempat pembuangan sampah pasar, itu.. ada di belakang, nanti bisa dilihat. Kita juga sedang melakukan perluasan untuk lahan membuang sampah sementara tersebut, sebelum diangkut. Ada juga bak sampah, jumlahnya 4 buah.

2. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan Pemkot Tangerang Selatan di pasar Ciputat ?

Jawab :

Sebenarnya, untuk pengelolaan sampah pasar, udah menjadi kebijakan di bawah ya.. Statusnya memang masih dibawah pihak kabupaten, PD Pasar, karena aset pasarnya belum dilimpahkan seluruhnya. Tapi, secara keseluruhan, pengelolaan sampah di pasar Ciputat ini sudah bagus, dalam arti sudah punya prosedur kerja lah.

3. Bagaimana prosedur kerja pengolahan sampah yang dilakukan pihak pasar Ciputat? Apakah dalam implementasi kebijakan tersebut sudah sesuai dengan prosedur ?

Jawab :

Pertama... sampah pasar dikumpulkan di belakang, lalu truk sampah milik pemkot datang mengangkut, seperti kemarin, saya sampe jam 1 malem buat ngawasin proses pengangkutannya. Setelah diangkut, itu sudah diluar tanggung jawab dan wewenang kami. Pihak pasar Ciputat hanya bertanggung jawab sampai sampah diangkut. Kalo sesuai prosedur apa tidak, menurut pandangan saya sih.. sudah ya.. Sampah dikumpulin, lalu dibuang.

4. Apakah sebelum dibuang, sampah-sampah tersebut diolah terlebih dahulu ?

Jawab :

Oh iyaa... kita kan punya tempat di belakang. Sampah dikumpulkan, lalu sebagian dibawa ke tempat pengolahan buat dijadikan kompos yang lokasinya ada di Pondok Cabe. Kalo untuk sampah kering, kaya botol-botol plastik waahh.. laris itu. Udah diserbu sama pemulung. Jadi bukan masalah lagi.

5. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, pihak-pihak mana saja yang terkait ? Bagaimana pelaksanaan koordinasinya?

Jawab :

Yaa... Di wilayah tangsel ada 4 pasar yang jadi perhatian utama, yaitu pasar Ciputat, Cimanggis, Serpong, satu lagi pasar Jombang. Masing-masing pasar saya kira prosedur pengolahannya hampir sama. Pihak yang terkait ya.. pihak dinas (DKPP) untuk masalah pendanaan, pihak swasta untuk pengolahan kompos, dan kerjasama dengan pasar-pasar lain agar mampu mengolah sampah di wilayahnya masing-masing.

6. Sumber dana untuk pengelolaan sampah di pasar ini berasal darimana ?

Jawab :

Memang ada dana dari pusat, tapi jumlahnya kecil sekali, selain itu, pengelolaan sampah ini kan sudah diserahkan pihak pemkot kepada pihak kita, jadi kita siap menanggung biaya operasional pengangkutan sampah. Tentunya kami juga berkoordinasi dulu dengan para pedagang, karena dana yang digunakan kan berasal dari dana retribusi yang ditarik dari ratusan pedagang sini.

Hasil Wawancara III

Nama Narasumber : Bapak Saiful
Jabatan : Kepala Pasar Jombang Kota Tangerang Selatan
Tempat : Pasar Jombang Kota Tangerang Selatan
Waktu : Hari Rabu, 30 Maret 2011

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengolahan sampah di pasar ini ?

Jawab :

Sebelumnya... pasar ini masih dibawah PD Pasar (kabupaten tangerang), tapi pasar ini masuk dalam wilayah pemkot tangsel, tepatnya di kelurahan jombang, kecamatan ciputat. Kalo untuk pengolahan sampah, bisa dilihat disana, kita punya 2 bak sampah untuk menampung sampah pasar. 1 bak sampah bisa menampung kira-kira 2 ton sampah. Pagi hari, pihak pemkot yang ambil. Disamping bak sampah, sedang dibangun tempat untuk mengolah sampah pasar, sudah hampir selesai sih pembangunannya..

2. Bagaimana kondisi kebersihan di pasar ini bagaimana ?

Jawab :

Kalo bicara masalah sampah, itu rumit ya.. Pemprov DKI aja belum mampu mengelola secara optimal. Khusus sampah pasar ini gak banyak yang mau ngurusin. Lain halnya dengan sampah dari industri, misalnya rumah makan, itu banyak untungnya. Sampah plastiknya masih laku dijual. Jadi, selain buang, dapet uang juga, ada keuntungan lebih lah.. Kalo sampah pasar kan, paling sayuran/sampah basah, cepet busuk... Selain itu, sampah yang ada di bak itu, bukan aja bersumber dari sampah pasar, tapi dari masyarakat sini. Sampah pasar mana ada yang dibungkus-bungkus plastik, itu dari rumah tangga. Saya sering lihat tuh, pagi-pagi sambil berangkat kerja sekalian buang sampah di bak situ. Kita sudah tegur, alasannya dirumahnya gak ada tong sampah, jadi terpaksa dibuang disitu. Trus juga, karena mereka belanjanya di pasar sini, jadi buang sampahnya juga disini, macem-macem lah... tapi, disamping itu, kita juga punya tukang sapu, atau istilahnya pesapon yang bersih-bersihin lapak pedagang, jadi yaa.. sangat ngebantu pihak kami.

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan kebersihan ini ?

Jawab :

Buat ngatasinnya... itu disana kan lagi dibangun bangunan untuk mengolah sampah pasar, untuk dijadikan kompos, karena sebagian besar sampah yang dibuang disitu kan sampah organik ya.. kalo sudah jadi, sampah bisa diolah sehingga mengurangi jumlah volume sampah yang dibuang di TPA. Memang untuk posisi, agak kurang pas ya.. karna di pinggir jalan persis, tapi memang lahan kosong yang kita punya cuma disitu.. Kita ada lahan kosong diatas, lantai 1, tapi kan tidak mungkin buat dijadikan tempat sampah, lagipula rencananya mau dibangun kantor nantinya. Kita juga menghimbau kepada pedagang, agar sampah dikumpulin yang benar. Mereka kan cari nafkah disini, dagang bertahun-tahun, jadi harus sadar dong.. Pasarnya bersih, mereka juga enak dagangnya, pembeli juga nyaman.

4. Bagaimana tentang partisipasi masyarakat mengenai kebersihan, khususnya di lingkungan pasar ini ?

Jawab :

Kalo untuk partisipasi.. ini kan dana untuk pengolahan sampah ini masih minim ya,, jadi kita adakan iuran kepada pedagang untuk operasional kebersihan pasar. Mereka setuju, karena itu kan buat kepentingan mereka, kembali kepada mereka sendiri. Kayak misalnya pesapon yang bersihin lapak-lapak mereka, itu kan perlu makan, rokok.. kalo untuk warga sekitar perlu bantuan banyak pihak, misalnya dari RT/RW untuk upaya sosialisasi kebersihan lingkungan.